

PAMERAN - 1 DEC 2003

47



- 1 DEC 2003

LAPORAN PENELITIAN STUDI KAJIAN WANITA
TAHUN ANGGARAN 2002

WACANA JENDER DI KALANGAN TOKOH AGAMA

Oleh:

Dra. DWI WIDYASTUTI, MA.
Drs. KRIS NUGROHO, MA.

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai Oleh Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

DIP Nomor : 003/XXIII/1/--/2002 Tanggal 1 Januari 2002

Kontrak Nomor : 023/LIT/BPPK-SDM/IV/2002

Ditjen Dikti, Depdiknas

Nomor Urut : 6

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA

September, 2002

GENDER IDENTITY



LAPORAN PENELITIAN STUDI KAJIAN WANITA
TAHUN ANGGARAN 2002

KKB
KK-2B
305.3
Wid
W

WACANA JENDER DI KALANGAN TOKOH AGAMA

Oleh:

Dra. DWI WIDYASTUTI, MA.

Drs. KRIS NUGROHO, MA.



3000127033141

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai Oleh Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

DIP Nomor : 003/XXIII/1/--/2002 Tanggal 1 Januari 2002

Kontrak Nomor : 023/LIT/BPPK-SDM/IV/2002

Ditjen Dikti, Depdiknas

Nomor Urut : 6

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA

September, 2002



AMAGH HONOT RADWALJONH - HINGLA ABASAY -

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**



- | | | |
|--|---------------------------------------|--|
| 1. Puslit Pembangunan Regional | 5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720) | 9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719) |
| 2. Puslit Obat Tradisional | 6. Puslit/Studi Wanita (5995722) | 10. Puslit/ Kesehatan Reproduksi |
| 3. Puslit Pengembangan Hukum (5923584) | 7. Puslit Olah Raga | |
| 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718) | 8. Puslit Bioenergi | |

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5962066
E-mail : lpunair@rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

3000127033141

IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN
STUDI KAJIAN WANITA

- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| 1. a. Judul Penelitian | : | Wacana Gender di Kalangan Tokoh Agama |
| b. Macam Penelitian | : | |
| 2. Kepala Proyek Penelitian | : | |
| a. Nama lengkap dan Gelar | : | Dra. Dwi Windyastuti, MA |
| b. Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| c. Pangkat/Golongan dan NIP | : | Penata/III C/131 801 643 |
| d. Jabatan sekarang | : | Lektor |
| e. Fakultas/Puslit/Jurusan | : | FISIP |
| f. Univ/Inst./Akademi | : | Universitas Airlangga |
| g. Bidang Ilmu yang diteliti | : | Sosial |
| 3. Jumlah Tim Peneliti | : | 2 (dua) orang |
| 4. Lokasi Penelitian | : | - |
| 5. Kerjasama dengan Instansi lain: | : | - |
| 6. Jangka Waktu Penelitian | : | 6 (enam) bulan |
| 7. Biaya yang diperlukan | : | Rp. 6.000.000,00
(Enam juta rupiah) |

Surabaya, 10 Oktober 2002

Mengetahui :

Kepuslit Studi Wanita :

Dra. Emy Susanti, MA

Ketua Peneliti

Dra. Dwi Windyastuti, MA
NIP.131 801 643

Menyetujui :

Ketua Lembaga Penelitian Unair,

Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S.
NIP. 130 701 125



RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian	: Wacana Gender di Kalangan Tokoh Agama
Ketua Peneliti	: Dra. Dwi Windyastuti, MA
Anggota Peneliti	: Drs. Kris Nugroho, MA
Fakultas / Puslit	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Studi Wanita Unair
Sumber Dana	: DP3M - SKW 2002

Persepsi masyarakat tentang perempuan dan peran serta kedudukannya masih menjadi kontroversi. Bahkan di era globalisasi perempuan masih sering "dicurigai" dan dijadikan "komoditas". Sosiolog *Pearson* dan *Bales* beranggapan laki-laki adalah pelaksana, sedangkan perempuan adalah pemelihara. Dan nampaknya anggapan semacam ini semakin mendapat tempat karena banyak dimanipulasi oleh berbagai kalangan agama demi kepentingan penindasan terhadap kaum perempuan. Banyak kaidah-kaidah agama dijadikan instrumen untuk menghambat perkembangan ke arah kesetaraan gender.

Penelitian tentang wacana gender di kalangan tokoh agama menggunakan tipe penelitian deskriptif, artinya penelitian ini ingin mendeskripsikan pandangan para tokoh agama dan intelektual yang memahami masalah agama, tentang gender, kemudian dianalisa dan disimpulkan. Sedangkan pengumpulan data bersifat dokumentasi literatur, dimana peneliti mengumpulkan literatur-literatur yang membahas mengenai pandangan tokoh agama ataupun kaum intelektual yang memahami masalah agama, mengenai gender. Selanjutnya dilakukan analisa dengan teknik analisa data yang dipakai untuk menganalisa keseluruhan data yang sudah terkumpul bersifat kualitatif, artinya data-data yang ada, baik berupa tabel maupun simbol-simbol akan dianalisa dan dipaparkan secara naratif

Munculnya ketidakadilan gender disebabkan oleh perbedaan gender, yang bisa dialami oleh laki-laki dan perempuan khususnya. Ketidakadilan gender merupakan system dan struktur dimana baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari system tersebut. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni marginalisasi atau pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan *stereotype* atau melalui pelabelan negatif, kekerasan atau *violence*, beban kerja lebih banyak dan lebih panjang, serta sosialisasi ideology nilai peran gender. Manifestasi ketidakadilan gender ini tidak bisa dipisah-pisahkan, karena saling berkaitan dengan berhubungan saling mempengaruhi secara dialektis

Dalam pembagian kerja, sebagian besar tokoh agama melihat bahwa perempuan tidak dibedakan dalam wilayah pembagiannya dengan laki-laki. Hanya perbedaan terjadi dalam peranan mereka dalam rumah tangga, dimana secara kodrati, wanita haruslah menjadi seorang ibu dan laki-laki adalah kepala rumah tangga. Hal ini berbeda dalam peran wanita politik, sampai saat ini masih



menjadi polemik di kalangan tokoh agama, terutama menyangkut legalitas perempuan untuk menjadi kepala negara/pemimpin. Umumnya mereka menggunakan kaidah agama untuk menghambat kemajuan keterlibatan perempuan dalam berbagai aktivitas. Persoalan-persoalan yang terkait dengan pembagian kerja, keadilan gender, diskriminasi perempuan dan pemberdayaan perempuan sering dianggap sebagai ancaman bagi aliran-aliran dalam agama.

Diskriminasi terhadap wanita terjadi di setiap aspek kehidupan, seperti lingkungan kerja, kegiatan perekonomian, politik, budaya bahkan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kehidupan beragama terlihat pula bahwa di satu sisi dalam sebagian besar agama berkembang gerakan liberal, ada tarikan yang sama kuatnya ke arah fundamentalisme. Fundamentalisme cenderung menekankan perbedaan perempuan dan laki-laki, baik di gereja-gereja AS ataupun masjid-masjid Iran, mengklaim sanksi ketuhanan bagi peran gender yang terpolarisasi. Tapi sebagian besar tokoh agama tidak setuju adanya diskriminasi terhadap wanita. Pada dasarnya mereka beranggapan bahwa diskriminasi terhadap wanita tidak perlu ada. Perempuan tetap mempunyai kesempatan untuk memimpin dalam berbagai bidang, tetapi hal ini berbeda dengan keberadaan mereka dalam keluarga. Pada dasarnya perempuan tetap mempunyai kewajiban untuk tunduk dan patuh kepada laki-laki (suami). Perempuan bisa memimpin jika laki-laki tidak ada di rumah.

Sebagai reaksi terhadap posisi wanita yang lebih dianggap sebagai warga kelas dua dalam berbagai bidang, pada awal abad ini marak dengan diorganisasikannya protes, demonstrasi, pemogokan buruh dan kampanye persamaan hak dan menentang penindasan terhadap buruh perempuan. Bagi tokoh-tokoh agama, adanya keadilan gender adalah sesuatu yang harus dilakukan. Karena pada saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk membatasi gerak perempuan dalam berbagai bidang. Adanya stereotype yang memagari profesi perempuan masih banyak terjadi di negara maju, apalagi negara berkembang. Jelas ini tak sesuai dengan ajaran agama karena pada dasarnya semua agama menghargai hasil kerja perempuan dan mendorong perempuan untuk bekerja serta berprofesi mulia. Perhatian para pencetus keadilan dan kesetaraan gender khususnya di kalangan perempuan hingga kini terfokus pada harapan dapat terciptanya kehidupan berkeadilan gender di semua aspek kehidupan masyarakat. Maka, dibutuhkan suatu kontrak social baru, kesadaran baru bahwa dunia ini dalam proses penyempurnaannya diperlukan keterlibatan dan tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan



SUMMARY

People's perceptions about women and her role still become a controversy. Moreover, in globalisation era, women often become an object. Pearson and Bales (sociologist) consider that men are operational, but women are the keeper. So, religion is often used as an instrument to reject the development of gender equality.

This research of gender discourse in religion leaders uses descriptive method. It means this research attempts to describe and analyze religion leaders' perceptions. The data collection is literature documentation. The technique of analysis is qualitative.

The study found that gender discrimination is caused by gender difference between men and women. Gender discrimination is a social construct in which men and women become the victim of that system. Regarding job division, the majority of religion leaders point out that there is equality between men and women. However, men and women differ in domestic sphere (family domain).

Women discrimination occurs in all aspects of life, for example, job areas, economy, politics, culture and family. In religion aspect, the growth of most religions is due to internal liberal movement. However, because of its strong influence, Fundamentalism has made the difference of men and women become more prominent. Yet, the majority of religion leaders do not agree with women discrimination.

Most religion leaders hope that gender equality can grow in social life because women's role is very important. Therefore, it requires a new social construct to meet the hope. Men and women's participation is needed to accomplish gender equality.



KATA PENGANTAR

Hanya dengan Kuasa dan Kehendak-Nya lah, akhirnya laporan penelitian mengenai Wacana Gender di Kalangan Tokoh Agama yang didanai melalui DP3M-SKW 2002 dapat penulis selesaikan.

Walaupun penelitian ini dianggap sudah selesai dengan mempertimbangkan berbagai kritik dan saran dari berbagai pihak, akan tetapi karena waktu yang disediakan masih dipandang kurang, maka peneliti tetap menganggap dan merasa bahwa hasil penelitian ini belumlah maksimal dan belumlah memuaskan, karena peneliti menyadari masih banyak kekurangannya seperti pepatah yang mengatakan "*Tiada Gading yang Tak Retak*", tidak ada sesuatu yang sempurna.

Akhirnya penulis tak lupa mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada semua staf yang ada di Lembaga Penelitian UNAIR maupun anggota serta pimpinan Pusat Penelitian / Studi Wanita UNAIR yang ikut memotivasi terselesainya laporan ini, serta tak lupa juga kepada Dikti melalui DP3M yang mendanai penelitian ini.

Surabaya, 10 Oktober 2002
Hormat Peneliti,

Dra. Dwi Windyastuti, MA
Drs. Kris Nugroho, MA



DAFTAR ISI

Ringkasan Penelitian	hlm
Summary	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Wacana Dalam Teori	7
2.2. Seks, Gender dan Feminisme	10
2.3. Gender Dalam Konstruksi Teoritik	12
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
3.1. Tujuan	
3.1.1. Tujuan Umum	34
3.1.2. Tujuan Khusus	34
3.2. Manfaat Penelitian	34
3.3. Sasaran Penelitian	35
BAB IV METODE PENELITIAN	
4.1. Tipe Penelitian	36
4.2. Teknik Pengumpulan Data	36
4.3. Teknik Analisa Data	36
4.4. Definisi Konsep	37
4.5. Definisi Operasional	37
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1. Pembagian Kerja	38
5.2. Diskriminasi	41
5.3. Keadilan dan Kesetaraan Gender	53
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1. Kesimpulan	78
4.2. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Perbedaan Laki-laki dan Perempuan	16
Tabel 2 Pandangan Tokoh Agama Terhadap Gender	73



PENDAHULUAN



1.1. LATAR BELAKANG

Sejak 10 tahun terakhir kata “gender” telah memasuki perbendaharaan di dalam setiap diskusi dan keluar di sekitar perubahan sosial dan pembangunan di dunia ketiga. Demikian juga di Indonesia, hampir semua uraian tentang program pengembangan masyarakat maupun pembangunan di kalangan organisasi non pemerintah diperbincangkan masalah gender. Di tengah maraknya diskusi dan perbincangan tersebut sebenarnya masih terdapat ketidakjelasan, kesalahpahaman mengenai apa yang dimaksud dengan konsep gender.

Ketidakjelasan itu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah: *pertama*, kata gender merupakan kata dan konsep asing sementara upaya menguraikannya ke dalam konteks Indonesia sulit untuk dilakukan ke dalam bahasa Inggris dimana bahasa Indonesia meminjam istilah gender tersebut tidak jelas membedakan antara sex (jenis kelamin) dan gender.¹ *Kedua*, belum ada uraian yang dapat menjelaskan konsep tersebut secara singkat, padat dan menyeluruh.

Pendapat yang umum dalam masyarakat adalah bahwa *sex*, *gender* dan *seksualitas* adalah sesuatu yang berkelanjutan, sehingga harus ada kecocokan antara gender dan orientasi seksual. Pendapat tersebut tidak

¹ Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Jakarta, Pustaka Pelajar, 1987), hlm. 7

seluruhnya benar, karena terdapat pensifatan yang bias ditukarkan antara perempuan dan laki-laki, berubah dari waktu ke waktu serta berbeda antara suatu tempat dengan tempat yang lain, antara satu kelas dengan kelas lain dapat berbeda.

Seperti disebutkan di atas, harus dibedakan antara konsep seks (jenis kelamin) dan konsep gender. Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sementara konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum lelaki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural.

Menurut *Turtle I* (1991) gender merupakan konstruksi sosial yang mengatur peranan laki-laki dan perempuan berdasarkan norma, adat istiadat yang terbentuk oleh proses sosialisasi. Gender bersifat dinamis dari waktu ke waktu, dari satu masyarakat dengan masyarakat lain tidak sama karena tergantung dari kultur sosial dan adat-istiadat dari masyarakat penghubungnya.

Pada pandangan masyarakat sering dikacaukan antara konsep gender dan gerakan feminisme. Hal ini terjadi karena salah satu stimulus kemunculan gerakan feminisme adalah karena ketidakadilan gender, yaitu adanya *superioritas* dan *privilege* terhadap gender tertentu (laki-laki) dan labelling negatif pada gender lainnya (perempuan). Namun, pada perkembangannya kekacauan dalam hubungan konsep gender dan feminisme adalah bahwa pada konsep gender dianggap senantiasa selalu dalam konteks perempuan, penindasan perempuan dan semacam itu. Padahal pengertian gender adalah pembagian peran serta tanggung jawab baik laki-laki maupun perempuan yang ditetapkan secara sosial maupun

kultural. Persepsi konsep gender yang lebih berkonteks perempuan diakibatkan oleh anggapan bahwa gender adalah suatu kodrat ketentuan yang ditentukan oleh Tuhan (*given*). Gender merupakan perbedaan yang disosialisasikan melalui sejarah yang panjang. Karena itu sangat erat kaitannya gender di tengah proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan diharapkan untuk berfikir dan bertindak sesuai dengan ketentuan sosial budaya dimana mereka berada.

Adanya perbedaan antara konsep gender dan feminisme seringkali pula mengakibatkan persepsi yang keliru terhadap dua hal tersebut. Bahkan, di kalangan perempuan sendiri ada beberapa gerakan yang kadang salah kaprah. Banyak diantara feminis yang memanfaatkan isu-isu feminisme sebagai alat untuk mendapatkan kepentingan mereka sendiri.

Dengan isu-isu feminisme yang mereka dengungkan itu, mereka dapat dengan mudah memperoleh hak-hak ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Sebagai contoh dalam bidang politik, para feminis menuntut adanya perimbangan antara jumlah laki-laki dan perempuan di DPR/MPR lalu perempuan menuntut adanya utusan atau wakil dari perempuan, tanpa mereka harus berjuang melalui pemilu. Asumsi ini didasarkan pada jumlah pemilih perempuan kurang lebih sebanyak 52% dari jumlah pemilih keseluruhan. Dengan asumsi semacam ini pula, ketika perempuan meminta jatah wakil golongan perempuan dalam DPR/MPR maupun dalam kabinet, maka hal ini bisa dikatakan sebagai sifat majunya perempuan dalam perpolitikan Indonesia khususnya. Mestinya dengan isu-isu feminisme, mereka bisa berkiprah secara langsung dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya tanpa harus minta jatah wakil perempuan.

Sebagai misal, adanya Menteri Urusan Wanita dilihat dari kaca mata gender, jelas hal ini merendahkan martabat perempuan itu sendiri. Karena sebagai manusia yang mempunyai kesamaan hak, kemampuan dan sebagainya dengan laki-laki tidak perlu diurus dengan seorang menteri dan menteri yang diplot khusus untuk wanita.

Sebagai misal juga, untuk tidak dikatakan minta kursi di DPR/MPR, mereka mencoba membentuk partai sendiri, yaitu PPI (Partai Perempuan Indonesia). Tentunya ini sangat ironis sekali, karena sifat eksklusifitasnya sebagai perempuan. Dan dalam konteks demokrasi, pembentukan partai perempuan jelas sangat diskriminatif sementara dalam analisis gender tidak dikenal diskriminasi antara perempuan dan laki-laki.

Dengan perspektif gender, bisa diterapkan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di semua bidang kehidupan kecuali yang bersifat kodrati. Perhatian para pencetus keadilan dan kesetaraan gender khususnya di kalangan perempuan hingga kini terfokus pada harapan dapat terciptanya kehidupan berkeadilan gender di semua aspek kehidupan masyarakat. Maka, dibutuhkan suatu kontrak sosial baru, kesadaran baru bahwa dunia ini dalam proses penyempurnaannya diperlukan keterlibatan dan tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan.

Perjuangan emansipasi atau pergerakan perempuan dalam bingkai kesetaraan gender di negeri ini cukup radikal dan menyejarah dimana senantiasa dilekatkan dengan Kartini, raut perempuan yang tertindas di zaman feodalisme dan kolonialisme. Dalam perjuangan menggapai representasi yang adil dalam kesetaraan gender, berhasil atau tidaknya tergantung pada sejauhmana praksis demokrasi itu dikembangkan dalam koridor yang memungkinkan laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan



yang sama dalam proses pengambilan keputusan politik atau apapun. Demokrasi tanpa partisipasi bukanlah demokrasi. *Bela Azbug* mengatakan bahwa perbedaan yang terjadi bila perempuan mempunyai ruang politik yang sama luasnya dengan laki-laki, perempuanlah yang akan mengubah hakikat kekuasaan, bukan kekuasaan yang akan mengubah hakikat perempuan.²

Persepsi masyarakat tentang perempuan dan perannya serta kedudukannya memang masih menjadi kontroversi. Bahkan di era globalisasi perempuan masih sering “dicurigai” dan dijadikan “komoditas”. Sosiolog *Pearson* dan *Bales* beranggapan laki-laki adalah pelaksana, sedangkan perempuan adalah pemelihara. Dan nampaknya anggapan semacam ini semakin mendapat tempat karena banyak dimanipulasi oleh berbagai kalangan agama demi kepentingan penindasan terhadap kaum perempuan. Banyak kaidah-kaidah agama dijadikan instrumen untuk menghambat perkembangan ke arah kesetaraan gender.

Dalam konteks agama, saat ini di Indonesia terdapat enam agama yang berkembang yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu. Dan sebagai media antara tokoh agama dengan para umatnya adalah tempat ibadah. Tempat ibadah ini biasanya digunakan sebagai jalur informasi para pemuka agama kepada umatnya, terutama yang berkaitan dengan aktifitas keagamaan. Yang dimaksud dengan tempat ibadah kategori utama adalah : 1. Islam : masjid; 2. Kristen: gereja permanen; 3. Katolik: gereja; 4. Hindu: Pure; 5. Budha: Vihara. Sedangkan yang dimaksud dengan tempat ibadah kategori menengah adalah: 1. Islam : mushola; 2. Kristen: Gereja semi permanen; 3. Katolik : kapel; 4. Hindu : kuil; 5. Budha : cetya.

² *Kompas*, 15 April 2002



Dan yang dimaksud dengan tempat ibadah kategori kecil adalah :1. Islam : langgar; 2.Kristen : -; 3.Katolik : sementara; 4.Hindu: sanggar; 5.Budha: -

Terlepas dari jumlah umat beragama yang ada beserta tempat ibadah dan para pemuka agama, pastilah terdapat perbedaan pandangan dalam segala hal, terutama gender. Kontroversi-kontroversi seperti inilah yang menjadi menarik untuk diteliti. Dalam satu agama saja, misalkan Islam, terdapat pandangan yang berbeda-beda mengenai gender apalagi ketika kita melihat lebih jauh dalam pandangan agama yang lain. Untuk itulah peneliti menjadi tertarik untuk membandingkan pandangan para tokoh agama, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, maupun Budha, dalam melihat gender.

1.2. RUMUSAN PERMASALAHAN

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah *Bagaimana wacana yang berkembang di kalangan tokoh agama terhadap konsep pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan, diskriminasi, keadilan dan kesetaraan gender ?*



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. WACANA DALAM TEORI

Mulai tahun 1970-an, paradigma analisis wacana dalam perspektif positivis dan konstruktivis telah mulai berkembang. Kata wacana acapkali diartikan sebagai salah satu kata yang banyak disebut saat ini, atau mungkin wacana diartikan sebagai unit bahasa yang besar dari kalimat atau mungkin diartikan sebagai pembicaraan atau diskursus. Nampaknya, wacana telah berkembang dan dipakai oleh banyak disiplin yang akhirnya memiliki perbedaan makna ataupun arti. Dalam studi sosiologi, wacana lebih menunjuk pada hubungan antara konteks sosial dari pemakaian bahasa, sedangkan dalam bentuk linguistik, wacana adalah unit bahasa yang lebih besar dari kalimat. Bahkan wacana merupakan rangkaian kalimat yang serasi yang menghubungkan proposisi satu dengan proposisi lain, kalimat satu dengan kalimat lain, membentuk satu kesatuan.³ Kemudian dalam studi psikologi sosial, wacana dimaksudkan sebagai pembicaraan atau mirip dengan struktur dan bentuk wawancara dan praktik dari pemakaiannya, sedangkan dalam studi politik, wacana adalah praktik pemakaian bahasa terutama politik bahasa, dan karena bahasa adalah aspek sentral dari penggambaran suatu subjek dan lewat bahasa ideologi terserap di dalamnya.

³ Dijelaskan bahwa wacana adalah satu peristiwa yang terstruktur diwujudkan di dalam perilaku linguistik (bahasa) atau lainnya. Edmonson, *Spoken Discourse: A Model for Analysis* (London : Longmann, 1981) hlm. 4. Sedangkan yang lainnya menjelaskan bahwa wacana adalah rekaman kebahasaan yang utuh tentang peristiwa komunikasi (Gazdar, Leinston, Djajasudarman) dalam fatimah, *Wacana : Pemahaman dan Hubungan Antar Unsur* (Bandung : Eresco, 1994) hlm. 2 - 4

Dalam konteks analisa wacana kritis (*Critical Discourse Analysis*), maka bahasa yang dianalisis bukan sekedar menggambarkan semata dari aspek kebahasaan, tetapi menghubungkan dengan konteks. Konteks disini berarti bahwa bahasa dipakai untuk tujuan dan praktek tertentu, termasuk praktek kekuasaan. Bagi *Fairclough* dan *Wodak* menggambarkan bahwa wacana sebagai praktek sosial yang menyebabkan suatu hubungan dialektis antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, intitusi dan struktur sosial yang membentuknya. Praktek wacana bisa menampilkan efek ideologi, ia dapat memproduksi dan mereproduksi hubungan kekuasaan yang tidak imbang antara kelas sosial, laki-laki dan perempuan, kelompok mayoritas dan minoritas dimana perbedaan itu dipresentasikan dalam posisi sosial yang ditampilkan.⁴ Karakteristik dalam analisis wacana kritis, antara lain memiliki 5 (lima) hal : (1) tindakan. Di sini wacana dipahami sebagai sebuah tindakan yang mengasosiasikan wacana sebagai bentuk interaksi, (2) konteks. Analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks dari wacana, seperti latar, situasi, peristiwa dan kondisi. Wacana disini dipandang, diproduksi, dimengerti dan dianalisis pada suatu konteks tertentu. Menurut *Guy Cooks*⁵, ada tiga hal yang sentral dalam analisis wacana, yakni teks, konteks, dan wacana. (3) historis. Wacana diproduksi dalam konteks tertentu dan tidak dapat dimengerti tanpa menyertakan konteks yang menyertainya. Salah satu aspek penting untuk bisa mengerti teks adalah dengan menempatkan wacana itu dalam konteks historis tertentu. (4) kekuasaan. Analisis wacana kritis juga mempertimbangkan elemen kekuasaan (*power*). Di sini setiap wacana yang muncul dalam bentuk teks, percakapan, tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar dan netral tetapi merupakan pertarungan kekuasaan. Kekuasaan yang berhubungan dengan wacana untuk melihat kontrol, baik secara fisik maupun mental atau

⁴ Norman Fairclough dan Ruth Wodak, *Critical Discourse Analysis*, dalam Teun A. Van Dijk (ed) *Discourse as Sosial Interaction : discourse Studies A Multidiciplinary Introduction*, Vol. 2, (London : Sage Publication, 1977) hlm. 258.

⁵ Guy Cook, *The Discourse of Advertising* (London & New York, Rontledge, 1994) hlm. 1 - 3

psikis. (5) idiologi. Idiologi juga merupakan konsep yang sentral dalam analisis wacana yang bersifat kritis. Teks, percakapan adalah bentuk dari praktek idiologi atau pencerminan dari idiologi tertentu.

Secara umum, analisis wacana kritis sangat dipengaruhi oleh pemikir seperti Michael Foucault yang menegaskan bahwa wacana sebagai praktek sosial. Wacana berperan mengontrol, menormalkan dan mendisiplinkan individu. Sementara Althausser, wacana berperan dalam mendefinisikan individu dan memposisikan seseorang dalam posisi tertentu. Wacana tertentu membentuk subyek dalam posisi-posisi tertentu dalam rangkaian hubungan dengan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Menurut Eriyanto⁶ yang mensarikan dari Norman Fairclough dan Ruth Wodak, dijelaskan ada lima pendekatan dalam analisis wacana, yakni :

1. Analisis Bahasa Kritis (*Critical Linguistics*). *Critical Linguistics* dipekenalkan oleh Halliday dalam kelompok pengajar Universitas East Anglia tahun 1970-an, dan ide analisis memusatkan pada bahasa dan menghubungkannya dengan idiologi. Inti teorinya adalah melihat bagaimana gramatika bahasa membawa posisi dan makna idiologi tertentu. Aspek idiologi diamati dengan melihat pilihan bahasa dan struktur tata bahasa yang dipakai
2. Analisis Wacana Pendekatan Perancis (*French Discourse Analysis*). Pendekatan ini menjelaskan bahwa bahasa adalah medan pertarungan melalui mana berbagai kelompok dan kelas sosial berusaha menanamkan keyakinan dan pemahamannya. Pendekatan ini dikembangkan oleh Pecheux yang diilhami idiologi Althusser dan Foucault.
3. Pendekatan Kognisi Sosial (*Socio Cognitive Approach*). Pendekatan ini dikembangkan oleh Teun A. van Dijk dari

⁶ Eriyanto, *Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media* (Jakarta: LKIS, 2001) hlm. 15 - 20



Universitas Amsterdam, Belanda, ia melihat bagaimana kelompok minoritas ditampilkan dan masalah yang diteliti adalah etnis, rasialisme dan pengungsi. Faktor kognisi sebagai elemen penting dalam produksi wacana. Wacana dilihat bukan hanya dari struktur wacana, tetapi juga menyertakan bagaimana wacana diproduksi.

4. Pendekatan Perubahan Sosial (*Socio-cultural Change Approach*). Tokoh pendekatan ini adalah Fairclough. Analisis wacana ini terutama memusatkan perhatian pada bagaimana wacana dan perubahan sosial. Wacana disini dipandang sebagai praktik sosial, ada hubungan dialektis antara praktik diskursif tersebut dengan identitas dan relasi sosial. Wacana dapat memproduksi dan mereproduksi status quo dan mentransformasikannya.
5. Pendekatan Wacana Sejarah (*Discourse Historical Approach*). Analisis ini dikembangkan oleh Ruth Wodak dari pengajar Vienna. Wodak banyak dipengaruhi oleh Jurgen Habermas dari mazhab Frankfurt. Penelitiannya terutama ditujukan untuk menunjukkan bagaimana wacana seksisme, antisemit, rasialisme dalam media dan masyarakat kontemporer. Analisis wacana harus menyertakan konteks sejarah bagaimana wacana tentang suatu kelompok atau komunitas digambarkan.

2.2. Seks, Gender dan Feminisme

Sebelum masuk pada pembahasan gender lebih lanjut, ada baiknya kita mengenali tentang perbedaan antara seks, gender dan feminisme. Seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, jenis kelamin laki-laki, yang memiliki penis, zakar, jakun, memproduksi sperma dan seterusnya. Sedangkan perempuan adalah manusia yang memiliki alat reproduksi seperti rahim, dan saluran-saluran untuk memproduksi sel telur, memiliki vagina,

mempunyai alat menyusui dan sebagainya. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada perempuan dan laki-laki selamanya, fungsinya tidak bisa dipertukarkan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan kebutuhan biologi atau ketentuan Tuhan (kodrat).⁷

Sedangkan gender merupakan pembagian laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya perempuan dianggap lebih lembut, emosional, keibuan dan sebagainya. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, perkasa dan sebagainya. Sifat-sifat tersebut tidaklah kodrat karena tidak abadi dan dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan dan sebagainya. Sementara itu ada perempuan yang kuat, rasional, perkasa dan sebagainya. Maka gender berubah menurut waktu dan tempat. Misalnya saja jaman dahulu ada suatu suku tertentu perempuan lebih kuat daripada laki-laki, tetapi pada jaman yang lain dan tempat yang berubah, lelaki yang lebih kuat. Gender juga berbeda menurut kelas sosialnya. Misalnya perempuan kelas bawah pedesaan lebih kuat dibandingkan kaum lelaki kelas atas. Pendek kata, semua sifat yang dapat ditukarkan antara perempuan dan laki-laki, yang berubah sesuai waktu, tempat dan kelas sosial disebut dengan gender.⁸

Munculnya ketidakadilan gender disebabkan oleh perbedaan gender, yang bisa dialami oleh laki-laki dan perempuan khususnya. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni marginalisasi atau pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan *stereotype* atau melalui pelabelan negatif, kekerasan atau *violence*, beban kerja lebih banyak dan lebih panjang, serta

⁷ Mansour Faqih, *op.cit.*, hlm. 2

sosialisasi ideologi nilai peran gender. Manifestasi ketidakadilan gender ini tidak bisa dipisah-pisahkan, karena saling berkaitan dengan berhubungan saling mempengaruhi secara dialektis.⁹

Dan feminisme dipahami sebagai suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat di tempat kerja dan dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut.¹⁰

Sedangkan *Yunahar Ilyas* sendiri mendefinisikan feminisme sebagai kesadaran akan ketidakadilan gender yang menimpa perempuan baik di dalam keluarga maupun masyarakat serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut.

Feminisme adalah gerakan yang berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas. Dalam usaha mengakhiri penindasan tersebut, mereka masih berselisih mengenai apa, mengapa, dan bagaimana penindasan itu terjadi. Dengan demikian, feminisme laki-laki, melainkan terbagi dalam berbagai perjuangan diantaranya untuk transformasi sistem dan struktur yang tidak adil menuju sistem yang adil bagi perempuan maupun laki-laki.¹¹

2.3. Gender Dalam Konstruksi Teoritik

Gelombang pemikiran gender terbagi menjadi tiga, yang ketiganya selalu berkesinambungan dan terarah. Gelombang pertama menekankan pada materialisme, artinya perempuan secara individual dan kelompok

⁸ *ibid*, hlm. 3

⁹ Mansour Faqih, *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 12 - 13

¹⁰ Kamla Bashin dan Night Said Khan, dalam Yunahar Ilyas, 1997, hlm. 14.

¹¹ Mansour Faqih, 1987, *op.cit*, hlm. 8



sosial dan kepentingan politik serta kebutuhan pribadi. Ini merupakan campuran antara tuntutan akan persamaan hak wanita dalam hukum dan pekerjaan dengan feminisme kesejahteraan yang tak mempersoalkan keutamaan peran wanita dalam rumah tangga melainkan memusatkan perhatian pada kebutuhan khusus mereka sebagai ibu dan istri. Pada gelombang kedua, solidaritas moral diciptakan oleh nilai feminis dan identitas yang berdasarkan pada perbedaan yang menyertakan material perempuan, fisik dan kekuatan afiliasi.¹² Sedangkan gelombang ketiga memperhatikan perjuangan perempuan melalui gerakan yang lebih jelas dan beragam seperti radikal, sosialis, liberal, kultural dan post-modernisasi.

Mengenai definisi gender itu sendiri, ada beberapa pendapat yang berbeda-beda. Ivan Illich mengartikan gender sebagai dualitas yang pada umumnya bersifat lokal dan terikat waktu, yang diberlakukan bagi laki-laki dan perempuan dengan keadaan-keadaan serta kondisi-kondisi yang mencegah mereka berbuat, berkata, berangan-angan atau berfikir tentang " hal yang sama " , sedangkan jenis kelamin (ekonomi atau sosial) diartikan sebagai dualitas yang merentang ke arah tujuan khayali berupa kesetaraan ekonomis, politis, sosial antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan Oakley menganggap gender sebagai perbedaan behaviour (perilaku) antara laki-laki dan perempuan secara konstruksi sosial, yakni perbedaan yang bukan kodrati melainkan diciptakan oleh laki-laki dan perempuan melalui proses sosial-budaya yang panjang. Pengertian gender juga terdapat dalam Webster' s New Word Dictionary, yaitu perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.¹³ Berkaitan dengan gender, Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, mengartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan

¹² Maggie Humm, *First wave Feminism : Feminism a Reader*, (Hertfordshire: Harvester Wheatsheaf, 1992, hlm. 11

¹³ Victoria Neufeldt (ed), "Webster's New Word Dictionary" dalam Nazaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gende*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 33

kelamin yakni laki-laki dan perempuan dan digunakan sebagai penunjukan bagi pembagian kerja yang dianggap tepat bagi mereka.¹⁴

Menurut teologi feminis, perempuan harus menempatkan posisinya dalam masyarakat supaya sejajar kedudukannya dengan laki-laki dan dapat merubah struktur sosial menjadi sama rata. Hal ini tercapai apabila ada perubahan pemahaman tentang feminisme.

Menurut feminisme radikal, pria dan wanita secara fundamental berbeda dengan *feminisme* dan *masculinisme*. Hidup berdampingan dalam kehidupan masyarakat dan menentukan nasibnya masing-masing berdasarkan pribadi. Namun ini tidak dapat terjadi apabila masih berlaku patriarkhal di dalam masyarakat. Sehingga feminisme radikal menyarankan supaya terjadi kesejajaran antara *feminisme mode* dan *masculinisme mode* dalam masyarakat. Hubungan kedua mode tersebut dapat berjalan dengan menghapus cinta antara keduanya yang menjadikan timbulnya hubungan ketergantungan satu sama lain akan terhapus dan memunculkan kesejajaran.

Dalam menciptakan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan menurut *Karl Marx* dan *Frederick Engels* tidak menolak adanya hubungan cinta antara laki-laki dan perempuan. Perhatiannya justru pada terbentuknya suatu pernikahan yang akan menghambat kreativitas perempuan secara bebas dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan sosial. Karl Marx dengan pernyataannya tentang kesadaran manusia tidak sebagai penentu eksistensi tetapi eksistensi sosial yang menentukan kesadaran mereka, mencoba menganalisa bahwasanya perubahan sosial akan mampu menciptakan perubahan pada individu sehingga keadilan sosial tercapai. Asumsi Marx didukung oleh pendukung feminis liberal yang didasarkan pada

¹⁴ Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, *Pengantar Teknik Analisa Gender*, Jakarta, 1999

pendapat John Locke tentang *natural rights* dimana manusia mempunyai hak hidup, mendapatkan kebebasan dan memperoleh kebahagiaan. Oleh karena itu untuk mencapainya harus digunakan rasionalitas yang tinggi. Pemikiran ini didasari oleh filsafat eksistensi dimana suami mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi untuk bekerja di sektor luar rumah sedangkan istri bergantung pada suami dan hanya berkutat di sektor domestik.¹⁵

Kritik tajam ditujukan pada pendukung aliran strukturalis atau liberal maupun fungsionalis-redaksionis-esensialis. Bahwa masuknya wanita dalam kehidupan sejajar dengan pria dan bersaing untuk mendapatkan kedudukan yang wajar secara politis dan sosial mengakibatkan hilangnya *feminisme mode* pada wanita, karena persaingan yang terjadi berada di area *masculiny mode*. Pertentangan juga ditampilkan oleh feminis radikal-sosial yang berasumsi bahwa menghilangkan ordinasi terhadap perempuan, menentang patriarkhi dan menghilangkan ordinasi terhadap perempuan, menentang patriarkhi dan kekerasan serta kesempatan kerja dan upaya sama. Ini didukung oleh banyak LSM di Indonesia.

Dalam melihat gender, ada dua perspektif yang melihat wanita sebagai subyek kajian formal yang menginginkan kebutuhan akan hal-hal yang konkret dan menonjolkan kepentingan perempuan. Sedangkan sensitivitas gender melihat wanita dari konstruksi pemikiran dan interpretasi sosial masyarakat terhadap wanita itu sendiri.

Pada dasarnya perbedaan laki-laki dan perempuan dapat diwakili dua konsep, yaitu jenis kelamin dan gender. Perbedaan jenis kelamin mengacu pada perbedaan fisik (biologis) terutama pada perbedaan fungsi reproduksi.

¹⁵ Ratna Megawangi, *Membicarakan Berbeda?*, (Jakarta, Mizan, 1999), hlm. 111 - 192

Sementara itu gender merupakan konstruksi sosio-kultural. Pada prinsipnya gender merupakan interpretasi cultural atas perbedaan jenis kelamin.

Gender dan jenis kelamin tidak dapat dipisahkan. Karena perbedaan yang didasarkan pada perbedaan fisik (biologis) mempunyai implementasi di dalam kehidupan sosial budaya. Pengaruh akan anatomi biologis maupun komposisi kimia dianggap berpengaruh terhadap perkembangan emosional dan kapasitas intelektual laki-laki maupun perempuan masih menjadi perdebatan. Unger misalnya, mengidentifikasi perbedaan emosional dan intelektual antara laki-laki dan perempuan sebagai berikut :¹⁶

Tabel 1
Perbedaan Laki-laki dan Perempuan

Laki-laki (<i>Masculine</i>)	Perempuan (<i>Feminin</i>)
1. Sangat agresif	1. Kurang agresif
2. Independen	2. Bergantung
3. Tidak emosional	3. Lebih emosional
4. Dapat menyembunyikan emosi	4. Cenderung tidak bisa menyembunyikan emosi
5. Lebih Obyektif	5. Lebih subyektif
6. Tidak mudah terpengaruh	6. Mudah terpengaruh
7. Tidak submisif	7. Submisif
8. Sangat menyukai eksakta	8. Kurang menyukai eksakta
9. Tidak mudah goyah menghadapi krisis	9. Mudah goyah menghadapi krisis
10. Lebih aktif	10. Lebih pasif
11. Lebih kompetitif	11. Kurang kompetitif
12. Lebih logis	12. Kurang logis
13. Lebih mendunia	13. Kurang mendunia/domestik

Dengan perbedaan otonomi biologis dan komposisi kimia yang berpengaruh dalam kapasitas emosional dan intelektual mengakibatkan persepsi yang seolah-olah mengendap di alam bawah sadar seseorang jika

seseorang mempunyai atribut biologis, seperti penis pada laki-laki dan vagina pada perempuan, maka itu juga menjadi atribut gender yang bersangkutan dan selanjutnya akan menentukan peran sosial di dalam masyarakat. Misalnya, sebagai seorang laki-laki maka ia dianggap rasional, jantan dan perkasa. Dengan sifat demikian maka di dalam masyarakat adalah seorang pelindung, ataupun pemimpin di dalam masyarakat (peran lebih ke publik). Sedangkan perempuan adalah seseorang yang dilindungi oleh laki-laki karena ia mempunyai sifat emosional, lemah sehingga peran yang dijalankan hanya terbatas pada peran domestik saja.

Adanya pembagian peran berdasarkan *feminine mode* dan *maskulin mode*, yaitu sifat-sifat inti yang melekat pada setiap individu yang menyertai jenis kelamin, membuat konsep tersebut diperdebatkan masalah keberadaan dalam wilayah kodrat alamiah (*nature*) atau sosial (*nature*), dimana dalam konsep Darwinisme disebutkan laki-laki berbeda dengan perempuan karena perbedaan fungsi-fungsi biologis, fisiologis, maupun fisik. Namun bagi mereka yang beranggapan bahwa perbedaan fungsi tersebut karena faktor budaya yang diinstitutionalkan pada keturunannya sehingga ketika teknologi semakin bertambah maju, semakin banyak usaha penyertaan perempuan dalam berbagai jenis pekerjaan, namun masih ada kendala dengan sisa-sisa budaya pembuatan hukum yang bias gender tersebut. Hal ini mengakibatkan munculnya usaha-usaha yang berkembang untuk mengeksploitasi dan memberdayakan peran perempuan dalam sektor publik yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi laki-laki saja. Ketimpangan dan marginalisasi ini sesungguhnya dikarenakan lemahnya posisi tawar mereka di hadapan laki-laki. Untuk itulah terdapat upaya pemberdayaan perempuan yang sesungguhnya bukan bermaksud untuk menciptakan perempuan yang lebih unggul dari laki-laki, namun lebih

¹⁶ Umar Nasarudin, *Argemen Kesetaraan Gender: Prespektif Al-Qur'an*, (Jakarta, Paramadina, 1999), hlm.

berupaya untuk mengidentifikasi kekuasaan, bukan sekedar dalam kerangka dominasi yang satu terhadap yang lain, melainkan lebih pada kerangka kapasitas perempuan untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal perempuan itu sendiri.¹⁷

Hal ini dibantah oleh kalangan feminis dan kalangan ilmuwan Marxis. Bagi mereka ini hanya merupakan bentuk dari stereotype gender. Para feminis dan ilmuwan Marxis percaya bahwa sifat tersebut tidak melekat melainkan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya, laki-laki yang emosional, lemah-lembut, keibuan sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa.

Penetapan atribut gender seperti demikian dinilai bias gender yang merugikan kaum perempuan. Tidak terlepas dari konstruksi masyarakat yang bersifat patriarkhi. Patriarkhi secara harfiah berarti kekuasaan bapak atau "patriach". Mulanya patriarkhi digunakan untuk menyebut suatu jenis "keluarga yang dikuasai oleh kaum laki-laki", yaitu rumah tangga besar patriach yang terdiri dari kaum perempuan, laki-laki muda, anak-anak, budak dan pelayan rumah tangga yang semuanya dibawah kekuasaan si laki-laki penguasa. Dan kemudian berkembang menyebut kekuasaan laki-laki, hubungan kuasa dengan apa laki-laki menguasai perempuan dan untuk menyebut sistem yang membuat perempuan dikuasai melalui berbagai macam cara.

Konstruksi kekuasaan laki-laki ini dikembangkan dari etika yang dikembangkan dari non konseptual dan etika yang dikembangkan religi. Etika yang dikembangkan dari non konseptual berawal dari sikap altruis adalah sikap "berkorban" yang tertanam pada diri perempuan sejak akil

baligh. Dimana ditanamkan bahwa nilai moral yang baik bagi masyarakat bagi seorang perempuan adalah menjadi ibu, adalah mengurus anak, suami dan rumah tangga. Dengan demikian ibu yang menyimpang dari pola ini dianggap mempunyai moral tidak umum atau tidak baik. Sedangkan etika yang dikembangkan religi dinilai tidak menguntungkan perempuan, mengidap bias laki-laki yang sangat kentara dan pada gilirannya menghambat keleluasaan perempuan dalam mengembangkan dirinya.

Dengan konstruksi semacam ini berimplikasi pada sistem-sistem lainnya yang ada dalam masyarakat, misalnya sistem politik. Bahkan negara, yang dalam hal ini mewakili sistem politik, sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan patriarkhi. Dengan negara yang bersistem patriarkhat maka tidak mengherankan jika kebijakan-kebijakan yang diambil lebih menguntungkan laki-laki daripada perempuan. Dan negara mempunyai kekuasaan, yang disebut Hegel sebagai realitas kekuasaan, untuk memutuskan apa yang terbaik bagi warganya.

Reaksi atas sistem "patriarkhat" ini memunculkan pemikiran-pemikiran para kaum perempuan, melahirkan teori feminisme, yang dipelopori pada tahun 1960-an. Dimana sebagai besar teori-teori feminisme masih menggunakan mainstream teori-teori yang berkembang seperti teori modernisasi (*modernisasi theory*), teori Marxis (*Marxism Theory*) serta teori psikoanalisa (*psychoanalytic theory*). Teori-teori feminisme, diantaranya, sebagai berikut :

1. *Feminis Liberal*

Feminisme liberal berangkat dari asumsi adanya pemisahan perempuan dari dunia publik. Pemisahan kaum perempuan ini digambarkan oleh Betty Freidan dalam bukunya *Feminin Mystique*.

¹⁷ Ratna Megawangi, *op.cit*, hlm. 95 - 109

Betty Friedan menyebutkan pedomestiksasian kaum perempuan ini didukung oleh ideologi palsu “*happy homemaker*”, yang sengaja dipelihara pada masa pasca perang dunia II untuk mengembalikan kalangan perempuan, sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat yang didominasi oleh laki-laki (*male-dominated society*), ke tempat yang mereka anggap pas atau sah bagi perempuan (*rightfull place*).¹⁸ Ideologi ini disebarkan melalui mass media, kalangan ilmuwan sosial dan para pendidik di sekolah-sekolah atau universitas- universitas. Akibat dari proses ideologisasi ini para perempuan mempunyai keyakinan bahwa kesuksesan dan kebahagiaan hanya terletak pada peranan tradisional mereka sebagai seorang ibu dan istri. Dengan tugasnya, sebagai seorang ibu dan istri, perempuan hanya menjalani rutinitas seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah lainnya. Dengan rutinitas tersebut mengakibatkan banyak kaum perempuan mengalami kebosanan dan merasa teralienasi dari kehidupan masyarakat. Dengan tersingkirnya perempuan dari dunia publik mengakibatkan perempuan terabaikan dari pembangunan. Perempuan tidak lagi mempunyai suara untuk menentukan hidupnya.

Dalam penentuan isu tidak terlepas dari teori yang berkembang pada masa itu, teori modernisasi, yang membagi masyarakat maju dimana terjadi proses perubahan secara linear. Dalam proses dari masyarakat tradisional menuju modern dibutuhkan pembangunan. Hal yang sama juga dianalogikan pada kaum perempuan. Kaum perempuan dianggap tertinggal (terabaikan dari proses pembangunan) sehingga isu yang utama adalah bagaimana perempuan mempunyai kesempatan yang sama dan bagaimana mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan. Agenda ini dipelopori oleh national Organization for

¹⁸ Nur Iman Subono, *Betty Freiden dan Feminisme Liberal: Pemikiran dan Aksi Politikanya*, (Jurnal

Women (NOW) yaitu dengan diajukannya *Bill of Rights for Women* pada tahun 1967 yang bertujuan untuk menjamin perempuan memiliki hak-hak yang sama sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki di Amerika. Dalam skala yang lebih luas, feminis liberal mendesak pada PBB serta lembaga dana. Sehingga muncullah program Women in Development (WID) pada tahun 1974. Pendekatan WID ini lebih menekankan pada aspek produktif yang diwujudkan di dalam berbagai proyek peningkatan pendapatan, koperasi, ketrampilan dan sebagainya. Diasumsikan bahwa peningkatan pendapatan akan mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan publik.

Dengan asumsi seperti ini memunculkan kritik kepada feminis liberal, khususnya program WID, yang tidak pernah mempertanyakan struktur yang mempertahankan subordinasi perempuan. Kritik lainnya muncul dari Ester Boserup dalam bukunya *Women's Role Economic Development* yang mengkritisi bahwa perempuan dapat dibebaskan oleh teknologi yang dianggap sebagai katalis dalam proses pembangunan. Bagi Esther Bosserup teknologi justru menyingkirkan kaum perempuan. Hal ini dapat dicermati pada teknologi pertanian yang mengakibatkan perempuan tidak lagi bekerja dengan ani-aninya karena sudah tergantikan dengan traktor dan sebagainya.

2. *Feminisme Radikal*

Feminisme radikal muncul sebagai reaksi atas feminis liberal yang tidak pernah mempersoalkan sistem yang mensubordinasikan perempuan. Bagi feminis radikal sumber dari ketidakadilan yang diterima perempuan adalah bersumber pada sistem kekuasaan yang bersifat patriarkhis. Kekuasaan patriarkhis ini berada dalam setiap



aspek kehidupan. Hal ini ditegaskan seorang feminis radikal yaitu Kate Millet dalam bukunya “ *sexual politics*” mengatakan bahwa akar dari penindasan kaum perempuan terkubur dalam sistem gender yang sangat patriarkhis.¹⁹ Dalam bukunya ia menyoroti seks sebagai alat politis bagi laki-laki dalam menguasai perempuan. Karena menurutnya relasi antara laki-laki dan perempuan merupakan paradigma dari relasi kekuasaan. Dengan pemenangan kekuasaan ini mengakibatkan kontrol laki-laki pada pembentukan nilai-nilai, emosi serta logika di tiap tahap penting kehidupan manusia bahkan pada kehidupan religi, keluarga maupun akademi.²⁰ Dengan masuknya kontrol tersebut pada setiap aspek kehidupan menyebabkan terlegitimasinya subordinasi terhadap perempuan. Nilai tersebut kemudian terinternalisasikan dalam diri perempuan dan menumbuhkan rasa inferioritas terhadap laki-laki.

Simbol perwujudan dari kekuasaan patriarkhis ini, diantaranya, diwujudkan dalam bentuk pornografi dan prostitusi. Pornografi dan prostitusi, menurut feminis radikal melambangkan perempuan sebagai milik, pelayan, asisten dan mainan laki-laki. Hal ini dikuatkan oleh Andrew Dworkin dan Chatarine Mac Kinnon yang mendefinisikan pornografi sebagai subordinasi perempuan lewat gambar dan suara yang juga meliputi dehumanisasi perempuan sebagai obyek seks, komoditas, barang, penghinaan, menyukai, disakiti atau dihina. Sedangkan prostitusi merupakan cerminan refleksi dari pornografi bahwa tubuh sebagai komoditas yang diperjualbelikan.

¹⁹ Adriana Venny, *Penguasa dan Politik Tubuh : Spirit Revolusi Kaum Feminis Radikal*, (YJP No. 15 Tahun 2000), hal 29

²⁰ *ibid*



Seperti yang telah disebutkan di atas, kekuasaan patriarkhis telah merasuki hampir semua aspek kehidupan, para feminis radikal mengajak perempuan untuk melakukan perlawanan dengan cara keluar dari semua relasi yang terjangkau oleh patriarkhis. Bagi feminis radikal perlawanan ini bisa dalam bentuk personal karena *personal is politic*. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk, diantaranya adalah menjadi lesbian. Lesbian bagi feminis radikal, adalah pilihan politis dan preferensi seksual guna melawan defines laki-laki atas kehidupan perempuan. Hal senada juga disuarakan oleh Andrienne Rich yang menyatakan lesbian sebagai perlawanan terhadap tiran kaum laki-laki serta simbol dukungan ideologis dan praksis antar perempuan.

Sedangkan alternatif yang ditawarkan feminis radikal lainnya yaitu Kate Millet adalah dengan menciptakan sebuah masyarakat baru dimana para laki-laki dan perempuan setara pada setiap level. Masyarakat ini dapat kita jumpai pada masyarakat androganis dimana sifat-sifat maskulin dan feminisme terintegrasi di dalamnya. Dalam pandangan feminis radikal ini, semua hal yang menghambat kemandirian perempuan dihapuskan baik itu lembaga, struktur, budaya, sosial, maupun seksualitas.

Feminis radikal ini banyak mengundang dari konsep mereka bahwa patriarkhis adalah sumber penindasan terhadap perempuan dan menganggap laki-laki sebagai musuh mereka. Hal ini dikuatkan oleh Jean Bethé Elshtain yang menyatakan bahwa feminisme radikal terjebak dalam dikotomi dan peran-peran antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan Monique Wittig, seorang feminis post modern yang juga lesbian, mengkritik kelesbianan feminis radikal dari sisi



semiotik. Menurutnya jika kaum feminis radikal ingin menolak relasi dalam masyarakat yang dijangkiti virus patriarchal, itu berarti ia harus keluar dari konteks dan kata “ perempuan ” yang sudah tidak relevan lagi dan dienyahkan. Sama halnya dengan kategori lesbianis yang menurutnya tidak terakomodir dalam tatanan bahasa yang dikotomis. Akibatnya feminis radikal masih terus berada dalam konteks narasi besar yang memang selama ini sangat dikotomis dan esensialis.

3. *Feminisme Marxis*

Feminisme Marxis menolak keyakinan dari feminisme radikal bahwa perbedaan biologilah sebagai dasar perbedaan gender dan patriarkhi sebagai satu-satunya sumber penindasan terhadap perempuan. Bagi feminisme Marxis penindasan perempuan adalah bagian dari penindasan kelas dalam hubungan produksi.²¹ Asumsi lainnya adalah hubungan suami istri serupa dengan hubungan antara borjuis dan proletar. Dimana dalam hubungan suami istri tersebut terjadi penindasan. Namun penindasan tersebut tidak hanya dilakukan oleh laki-laki namun juga sistem kapitalis. Hal ini diterangkan oleh Frederich Rangel dalam bukunya *The Origin of Family : Privat Property dan State*. Dikatakan bahwa sejarah keterpurukan perempuan bukan disebabkan oleh teknologi melainkan karena perubahan dalam organisasi kekayaan.²² Perubahan organisasi kekayaan ini dimulai pada masa dimana orang mulai mengenal kepemilikan pribadi (*private property*). Dan *private property* inilah yang menjadi dasar dari perdagangan. Karena laki-laki mengontrol produksi untuk perdagangan, maka mereka mendominasi hubungan

²¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 89

²² *Ibid.*, hlm. 87

sosial dan politik dan perempuan direduksi menjadi bagian dari properti belaka.

Dominasi laki-laki ini dipertajam atau didukung oleh sistem kapitalisme karena bagi sistem kapitalisme penindasan terhadap perempuan sangat menguntungkan. *Pertama*, melalui bentuk eksploitasi pulang ke rumah dimana proses ini diperlukan guna membuat laki-laki yang dieksploitasi di pabrik lebih bekerja secara produktif. *Kedua*, kaum perempuan dianggap bermanfaat bagi sistem kapitalisme dalam reproduksi buruh murah. *Ketiga*, buruh perempuan mempunyai upah yang murah dan buruh perempuan sebagai cadangan yang tak terbatas.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak hanya perempuan saja yang dieksploitasi namun juga buruh laki-laki sehingga bagi feminis marxis sistem patriarkhis bukanlah satu-satunya akan penindasan melainkan sistem yang lebih besar lagi yaitu sistem kapitalisme. Sehingga bagi feminis marxis yang perlu dihancurkan adalah struktur kapitalis yang eksploitatif. Dalam rangka menghancurkan sistem ini diperlukan revolusi struktur kelas sehingga mencapai persamaan. Namun persamaan ini harus didukung masuknya tugas domestik menjadi urusan publik.

Pandangan di atas juga disebut sebagai pandangan feminisme marxis klasik. Namun pandangan ini mempunyai kekurangan yang kemudian disempurnakan oleh neo-marxis. Bagi feminis neo-marxis kaum perempuan sebenarnya telah berperan penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat dan kerja yang dilakukan perempuan di sektor publik dan domestik berfungsi untuk mendukung eksistensi struktur



masyarakat yang timpang. Program yang ditawarkan oleh feminis neo-marxis adalah *Women and Development (WAD)*. Pendekatan WAD berfokus pada hubungan antara perempuan dan proses pembangunan, dan bukan hanya strategi untuk mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan. Pendekatan WAD secara implisit mengasumsikan bahwa posisi perempuan akan meningkat jika struktur politik ekonomi internasional lebih merata.

Pandangan feminisme marxis ini banyak mendapat kritikan dari feminis lainnya. Menurut Zillah Einstein, patriarkhi sudah muncul sebelum kapitalisme dan tetap ada pada pasca kapitalisme jadi bukan dimulai pada masa orang mengenal kepemilikan atau *private property*. Dan kritik umum lainnya adalah bahwa partisipasi perempuan dalam ekonomi memang perlu namun tidak serta merta menaikkan status perempuan.

4. *Feminis Sosialis*

Feminis sosialis selama ini dilihat sebagai kejutan dari marxisme klasik, karena memiliki persamaan dalam memandang kebebasan, persamaan dan peran negara, tetapi pendekatan feminis sosialis berusaha menunjukkan bahwa situasi yang dialami kaum perempuan dan aspek hubungan personal membutuhkan analisa yang lebih teliti dari pendekatan Marxis. Allison Jaggar menyatakan bahwa feminis sosialis merupakan sintetis dari dialektika materialisme Marx dan Engels dengan gagasan personal is political dari feminisme radikal.²³

²³ *ibid*, hlm. 89



Dari sintesa tersebut dihasilkan pemikiran yaitu perlunya dilakukan akses budaya langsung untuk membangun kesadaran feminis selain dari upaya mentransformasi bangunan dasar ekonomi suatu masyarakat. Pemikiran lainnya adalah masuknya kaum perempuan ke dalam sektor publik belum cukup, tetapi harus dipastikan agar perempuan mendapatkan akses ke pekerjaan yang lebih baik, serta kesempatan peningkatan karir pada posisi jabatan yang lebih tinggi.

Program yang diajukan oleh feminis sosialis adalah *Gender and Development* (GAD). Pendekatan dari program ini menekankan titik analisisnya pada pertanyaan mengapa perempuan secara sistematis diletakkan pada peran inferior dalam masyarakat. GAD berangkat dari cara pandang holistik, yaitu melihat totalitas organisasi sosial, ekonomi dan politik untuk dapat memahami sub ordinasi dalam masyarakat. GAD melihat perempuan sebagai agen perubahan daripada penerima bantuan pembangunan pasif.

Bagi banyak kalangan aliran ini dianggap memiliki harapan di masa depan karena analisis yang mereka tawarkan lebih diterapkan oleh umumnya gerakan perempuan.

5. *Feminis Psikoanalisa*

Feminis psikoanalisa merupakan reaksi dari teori psikoanalisa yang dikemukakan oleh Sigmund Freud yang beranggapan bahwa peran dan relasi gender ditentukan oleh dan mengikuti perkembangan psikoseksual. Freud membagi enam tahapan psikoseksual pada manusia yaitu : tahap oral, tahap anal , tahap phallic, tahap latency dan tahap genital.

Dari tahap-tahap yang dikemukakan oleh Freud dapat disimpulkan bahwa perbedaan biologislah yang menyebabkan perbedaan gender. Hal ini ditegaskan Freud bahwa manusia yang normal adalah laki-laki karena memiliki penis. Sedangkan perempuan adalah manusia yang tidak normal sehingga ketika perempuan kekurangannya tidak memiliki penis maka muncullah rasa rendah diri serta kecemburuan terhadap penis (*penis envy*).

Dari asumsi ini perlulah dipertanyakan apakah perempuan iri kepada alat kelamin laki-laki atau iri kepada hak-hak yang diberikan masyarakat kepada makhluk yang berjenis kelamin laki-laki. Hal ini ditegaskan oleh Juliet Mitchel, Mitchel memperkirakan bahwa asumsi Freud tentang fakta biologis perempuan sebagai kodratnya (*Biologis is Desnity*) telah terkontaminasi interpretasi sosial yang patriarkhis.²⁴ Sedangkan Karen Horney menekankan bahwa lingkungan memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi perkembangan individu sebagai manusia. Oleh masyarakat seringkali perempuan dipaksa menjadi pasif, menjadi feminin dan narsis (mengagumi diri dan berdandan) sebaiknya jika seorang perempuan yang ingin memberontak dari nilai-nilai tersebut umumnya masyarakat memberi label bahwa perempuan tersebut "sakit". Sedangkan bagi Talcot Parson dan Boles²⁵ menganggap bahwa pembagian peran secara seksual adalah sesuatu yang wajar. Hal ini menekankan pada bagaimana sistem itu senantiasa berfungsi untuk mewujudkan keseimbangan di dalam suatu masyarakat. Keadaan itu terwujud bila tradisi peran gender senantiasa mengacu pada posisi semula. Kedudukan perempuan dan laki-laki dalam struktur sosial yang berbeda dimaksudkan sebagai suatu keseimbangan yang dilakukan

²⁴ Adriana Very, *Feminisme dan Psikoanalisa*, Jurnal Perempuan No. 16, (Jakarta, YJP, 2000) hlm. 15

oleh alam sehingga hal ini dianggap hal yang wajar dan bukan sebagai diskriminasi dan sub-ordinat dari salah satunya.

6. *Post-Feminisme*

Post-feminisme, dapat dikatakan sebagai feminisme gelombang kedua, merupakan reaksi dari feminisme selama ini. Bagi para post-feminis, kaum feminis cenderung ortodoks dan menjadi fanatik dengan penjelasan wacana-wacana patriarchal. Hal ini diperkuat oleh Julia Kristeva, feminis yang mempunyai latar belakang studi *semiotic* dan *marxisme*, menganggap pergerakan feminisme sebagai pergerakan “kaum histeris”.²⁶ Hal senada juga dikemukakan oleh Camille Paglia seorang profesor studi kemanusiaan (*Humanities*) Universitas Philadelpia yang mengkritik sikap feminis ortodoks sebagai kelompok yang selalu menganggap perempuan selalu menjadi korban.

Post-Feminis sejak tahun 1960-an berusaha untuk mendekonstruksi wacana patriarchal terutama wacana yang dikembangkan oleh *feminist revolutionnaires* (FR), yang disebut juga feminis radikal. Tesis dasar kelompok FR adalah menentang determinisme biologis, yaitu perempuan tersubordinasi dengan norma-norma maskulin. Ditekankan karena masyarakat patriarkhi memposisikan perempuan sebagai “yang lain” (the other) dalam tataran biologis dan psikis. Sedangkan kelompok-kelompok post feminis memandang bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara biologis, fisik maupun sosial adalah tidak bisa diubah. Oleh sebab itu kelompok ini memilih metode dekonstruksi untuk melihat teks-teks ketertindasan perempuan. Dan kelompok ini

²⁵ Nazaruddin Syamsuddin, *op.cit*, hal 51 - 53

²⁶ Arivia, Gadis, “*Post-Feminisme : Feminisme telah Mati*”, Jurnal Perempuan No.14 (Jakarta, YJP, tahun 2000), hlm.99

bukan menekankan kesetaraan (*equality*) tetapi lebih menekankan perbedaan (*difference*).

Demikianlah pemikiran-pemikiran serta gerakan-gerakan yang mewarnai nuansa feminisme di dunia saat ini. Perbedaan gender (*gender differences*) sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequities*). Namun kenyataan yang terjadi adalah perbedaan gender telah melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan baik pada kaum laki-laki maupun perempuan. Manifestasi ketidakadilan sebagai berikut :

a. Gender dan marginalisasi

Proses marginalisasi pada perempuan dapat terjadi di dalam rumah tangga, tempat kerja, masyarakat bahkan negara. Salah satu contoh dari marginalisasi pada revolusi hijau. Dengan revolusi hijau yang menggunakan bibit padi unggul yang tumbuh lebih rendah yang harus menggunakan sabit dalam memanennya sehingga ani-ani yang selama ini digunakan dalam memanen tidak dapat digunakan padahal ani-ani adalah alat bagi perempuan dalam memanen. Sehingga terjadilah proses peminggiran dalam bidang pertanian yang mengakibatkan kaum perempuan tidak dapat lagi bekerja.

b. Gender dan stereotype

Stereotype atau pelabelan terhadap kelompok tertentu yaitu perempuan seringkali menimbulkan ketidakadilan dan merugikan. Banyak peraturan perempuan, aturan keagamaan, kultur dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena *stereotype* tersebut. Satu contoh, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa tugas istri adalah melayani sang suami.

c. Gender dan beban kerja

Seringkali pekerjaan domestik diidentikkan dengan pekerjaan perempuan. Sehingga bagi sang perempuan yang bekerja di sektor publik masih dituntut untuk menyelesaikan tugas domestiknya. Dan ini mengakibatkan beban kerja yang ditanggung oleh perempuan lebih berat daripada laki-laki.

d. Gender dan kekerasan

Kekerasan adalah serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender disebut gender related violence. Banyak macam dan bentuk kejahatan yang dikategorikan sebagai kekerasan gender. *Pertama*, bentuk perkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan. *Kedua*, tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga (domestic violence). *Ketiga*, bentuk penyiksaan yang mengarah pada organ alat kelamin (genital mutilation). *Keempat*, kekerasan dalam bentuk pelacuran (prostitution). *Kelima*, kekerasan dalam bentuk pornografi. Jenis ini termasuk kekerasan fisik, yaitu pelecehan terhadap perempuan. *Keenam*, kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam keluarga (enforced sterilisation). *Ketujuh*, jenis kekerasan terselubung yakni memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh. *Kedelapan*, tindakan kejahatan yang paling umum diadakan di masyarakat yakni yang dikenal dengan pelecehan seksual (sexual and emotional harassment).

Dengan perbedaan otonomi biologis dan komposisi kimia yang berpengaruh dalam kapasitas emotional dan intelektual mengakibatkan

persepsi yang seolah-olah mengendap di alam bawah sadar seseorang jika seseorang mempunyai atribut biologis, seperti penis pada laki-laki dan vagina pada perempuan, maka itu juga menjadi atribut gender yang bersangkutan dan selanjutnya akan menentukan peran sosial di dalam masyarakat. Misalnya sebagai seorang laki-laki maka ia dianggap rasional, jantan dan perkasa. Dengan sifat demikian maka di dalam masyarakat adalah seorang pelindung ataupun pemimpin (peran lebih ke publik). Sedangkan perempuan adalah seseorang yang dilindungi oleh laki-laki karena ia mempunyai sifat emosional, lemah sehingga peran yang dijalankan hanya terbatas pada peran domestik saja.

Hal ini dibantah oleh kaum feminis dan kalangan ilmuwan Marxis. Bagi mereka ini hanya merupakan bentuk dari stereotype gender. Para feminis dan ilmuwan marxis percaya bahwa sifat tersebut tidak melekat melainkan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa.

Penetapan atribut gender seperti demikian dinilai bias gender yang merugikan kaum perempuan. Tidak terlepas dari kontruksi masyarakat yang bersifat patriarki. Patriarki secara harfiah berarti kekuasaan bapak atau "*patriach*". Mulanya patriarkhi digunakan untuk menyebut suatu jenis "keluarga yang dikuasai oleh kaum laki-laki", yaitu rumah tangga besar patriarch yang terdiri dari kaum perempuan, laki-laki muda, anak-anak, budak dan pelayan rumah tangga yang semuanya di bawah kekuasaan si laki-laki penguasa. Dan kemudian berkembang menyebut kekuasaan laki-laki, hubungan kuasa dengan apa laki-laki menguasai perempuan dan untuk menyebut sistem yang membuat perempuan dikuasai melalui berbagai cara.

Konstruksi kekuasaan laki-laki ini dikembangkan dari etika yang dikembangkan dari non konseptual dan etika yang dikembangkan religi. Etika yang dikembangkan dari non konseptual berawal dari sikap altruis adalah sikap “berkorban” yang tertanam pada diri perempuan sejak akil baligh. Dimana ditanamkan bahwa nilai moral yang baik bagi masyarakat, bagi seorang perempuan adalah menjadi ibu, adalah mengurus anak, suami dan rumah tangga. Dengan demikian ibu yang menyimpang dari pola ini dianggap mempunyai moral tidak umum atau tidak baik. Sedangkan etika yang dikembangkan religi dinilai tidak menguntungkan perempuan, mengidap bias laki-laki yang sangat kentara dan pada gilirannya menghambat keleluasaan perempuan dalam mengembangkan dirinya.

Dengan konstruksi semacam ini berimplikasi pada sistem-sistem lainnya yang ada pada masyarakat, misalnya sistem politik. Bahkan negara yang dalam hal ini mewakili sebagai sistem politik, sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan patriarki. Dengan negara yang diambil lebih menguntungkan laki-laki daripada perempuan. Dan negara mempunyai kekuasaan, yang disebut *Hegel* sebagai realitas kekuasaan, untuk memutuskan apa yang terbaik bagi warganya.

Reaksi atas sistem “*patriarkhal*” ini memunculkan pemikiran-pemikiran para kaum perempuan, melahirkan teori feminisme, yang dipelopori pada tahun 1960-an. Dimana sebagian besar teori-teori feminisme masih menggunakan *mainstream* teori-teori yang berkembang seperti teori modernisasi (*modernism theory*), teori Marxis (*Marxism Theory*) serta teori psiko analisa (*psychoanalytic theory*).



BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. TUJUAN

3.1.1. Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum mempunyai tujuan sebagai berikut :

- Untuk mengetahui pandangan para tokoh agama terhadap wacana gender
- Untuk mengetahui ide / gagasan para tokoh agama tentang gender

3.1.2. Tujuan Khusus

Sedangkan yang menjadi tujuan khusus dari penelitian tentang wacana gender dalam pandangan tokoh agama ini adalah :

- Untuk mengetahui pemahaman gender di kalangan tokoh agama
- Untuk mengetahui pemahaman para tokoh agama dalam membedakan gender, feminisme dan kodrati
- Untuk mengetahui pendapat para tokoh agama dalam menyikapi posisi perempuan, baik di sektor publik maupun di sektor domestik.
- Untuk mengetahui pendapat para tokoh agama dalam memandang kesetaraan gender di masyarakat.

3.2. MANFAAT

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

- Para tokoh agama, yang nantinya akan menambah wawasan mereka tentang gender.



- Aktivist perempuan, dengan mengetahui pandangan para tokoh agama tentang gender diharapkan nantinya terjadi proses dialogis antara aktivis dan tokoh agama dalam mewujudkan kesetaraan gender di masyarakat.
- Kaum perempuan, dapat menambah wawasan mereka terlebih lagi masukan - masukan dari para tokoh agama
- Masyarakat umum (laki-laki dan perempuan), dengan bertambahnya masukan dari para tokoh agama tentang gender, maka pemahaman masyarakat (laki-laki dan perempuan) akan kesetaraan dan keadilan gender akan bertambah pula.

3.3. SASARAN

Sasaran dalam penelitian ini adalah para tokoh agama dan para intelektual yang memahami masalah agama, baik agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha.

BAB IV

METODA PENELITIAN

4.1. TIPE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu jenis penelitian yang melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan, artinya penelitian ini ingin mendeskripsikan pandangan para tokoh agama dan intelektual yang memahami masalah agama, tentang gender, kemudian dianalisa dan disimpulkan.

4.2. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini, pengumpulan data bersifat dokumentasi literatur, dimana peneliti mengumpulkan literatur-literatur yang membahas mengenai pandangan tokoh agama ataupun kaum intelektual yang memahami masalah agama, mengenai gender.

4.3. TEKNIK ANALISA DATA

Sedangkan teknik analisa data yang dipakai untuk menganalisa keseluruhan data yang sudah terkumpul bersifat kualitatif, artinya data-data yang ada, baik berupa tabel maupun simbol-simbol akan dianalisa dan dipaparkan secara naratif.

4.4. DEFINISI KONSEP

1. Gender

adalah merupakan pembagian laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya perempuan dianggap lebih lembut, emosional, keibuan dan sebagainya. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, perkasa dan sebagainya.

2. Wacana

Merupakan unit bahasa yang besar dari kalimat atau mungkin diartikan sebagai pembicaraan atau diskursus.

3. Tokoh Agama

Adalah orang yang mempunyai keahlian dan memahami masalah agama baik yang berasal dari pemuka agama maupun kaum intelektual. Agama di sini adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu ataupun Budha.

4.5. DEFINISI OPERASIONAL

1. Pembagian Kerja

Merupakan kedudukan ataupun peranan dalam kehidupan bermasyarakat yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin.

2. Diskriminasi

Adalah perbedaan ataupun pembatasan yang termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, subordinasi maupun stereotype yang negatif.

3. Keadilan dan Kesetaraan Gender

Persamaan kedudukan dan peranan wanita dengan laki-laki, tanpa melihat jenis kelamin maupun budaya.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembagian Kerja

Pada masyarakat Indonesia, misal di Minangkabau, posisi perempuan dalam sistem kekeluargaan Minangkabau tergolong unik. Antara struktur sosial dan ekonomi terdapat perbedaan. Menurut adat, perempuan Minang ada pada ranah domestik dan cara pandang terhadap perempuan sangat bias gender, perempuan hanya sebagai obyek. Mereka disebut sebagai *Bundo Kanduang* yaitu pengayom rumah gadang, bikin semarak negeri, hiasan dalam kampung, tahu malu dan sopan, untuk menghias kampung halaman, nagari, pasar, masjid dan rumah tangga. Tapi sosok laki-laki ideal tidak disebutkan dengan jelas, hanya sebagai sumber produksi atau pagar nagari.

Secara ekonomis, posisi perempuan lebih baik daripada posisi laki-laki. *Pertama*, dalam hal warisan yang hanya diperuntukkan bagi perempuan. *Kedua*, dalam hubungan suami istri, posisi suami lemah sekali dalam struktur rumah tangga Minang. Wacana gender baru mengusik perempuan Minang setelah muncul Perda No. 9 / 2001 untuk kembali pada nagari dengan konsep “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*” (adat berdasar agama, agama berdasar Kitabullah). Sekalipun bertujuan baik, namun Perda tersebut selain dinilai bias gender juga dianggap mempersempit ruang gerak perempuan Minang. Oleh karena itulah tugas

berat yang dipikul masyarakat Minang adalah merumuskan kembali konsep nagari dengan mempertimbangkan perkembangan terkini.²⁷

Menurut Maksun Faiz, seorang intelektual Islam, dalam Islam, peran politik, sampai saat ini masih menjadi polemik di kalangan ulama, bahkan di kalangan para politisi muslim, terutama menyangkut legalitas perempuan untuk menjadi kepala negara.²⁸ Umumnya mereka menggunakan kaidah agama untuk menghambat kemajuan keterlibatan perempuan dalam berbagai aktivitas. Persoalan-persoalan yang terkait dengan pembagian kerja, keadilan gender, diskriminasi perempuan dan pemberdayaan perempuan sering dianggap sebagai ancaman bagi aliran-aliran dalam agama.

Menurut *N. Graafland*, dalam masyarakat Minahasa, dimana sebagian besar penduduknya adalah jemaat Kristen, pada jaman animisme perempuan tidaklah rendah martabatnya. Di daerah utara jabatan imam boleh diduduki oleh kaum pria, tetapi di daerah selatan umumnya wanitalah yang memangku jabatan itu.²⁹ Dalam hal memenuhi kewajiban-kewajiban agamanya, wanita yang menganut agama asli masih lebih tekun daripada pria; umumnya atas keinginan wanitalah pesta-pesta korban diselenggarakan. Wanita Minahasa mendapatkan keyakinan bahwa agama Kristen lebih memenuhi kebutuhan hati manusia, dibandingkan dengan ibadat kepada nenek moyangnya. Kepekaan terhadap perasaan jiwa yang halus dan suara batinnya, menyebabkan bahwa Injil pada umumnya meninggalkan kesan yang lebih mendalam padanya daripada kaum pria. Disamping itu ia memiliki bakat yang istimewa pula untuk menangkap mengenai apapun juga dan untuk memperkembangkan daya pikirnya; sifatnya yang mudah menampung pengetahuan sering membuatnya lebih

²⁷ *Kompas*, 18 Maret 2002

²⁸ *Surabaya Pos*, 19 April 2002

²⁹ Maria Ulfah Subadio, SH, Prof. Dr. T. O. Ihromi, SH, MA, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*, (Yogyakarta, UGM Press, 1986). Hlm. 39

maju daripada kaum pria. Para wanita di sana mengambil pembawaan Maria, ibunda Kristus, sebagai teladan kemandirian.

Menurut *Pandhite Anom Jalakarana Manuaba*, seorang tokoh agama Hindu, mempunyai pendapat tentang pembagian wilayah kerja. Menurutnya agama Hindu tidak mengenal pengkotaan wilayah kerja antara laki-laki dan perempuan. Hal ini seperti diungkapkannya sebagai berikut :

“ Tidak terkotak-kotak wilayah kerja laki-laki dan perempuan, dalam ajaran Agama Hindu dikatakan, “ laksanakan kewajibanmu tanpa menghitung untung rugi karena aku melebur dalam segala ciptaanku” , oleh karena itu tidak ada gender dalam masyarakat Hindu. Sehingga dalam keseharian sebagaimana manusia secara utuh tidak berbeda antara laki-laki dan perempuan baik karirnya di bidang publik maupun rumah tangga, karena sudah ada kesetaraan dari awal. Istri saya pun pendeta, ia berhak memimpin upacara keagamaan, tidak harus pria. Cuma ketika masuk rumah tangga, sifat kodrati yang juga diberikan Tuhan, tidak bisa dibantah. Saya rasa semua wanita seluruh belahan dunia manapun akan seperti itu. Ketika ia masuk dalam rumah tangga, ia akan menjadi ibu rumah tangga, ibu dari anak-anak. Tidak bisa lepas dari itu. Bukan berarti ada diskriminasi. Kalau kita mau profesional, si bapak pegawai biasa, begitu ia kembali ke rumah, si bapak menjadi kepala rumah tangga dan si ibu menjadi ibu rumah tangga, sehingga rumah tangga bisa hamonis. Seperti diatur dalam kehidupan normatif, “ *wanita tidak dihormati sebelum ia menjalankan perannya dalam rumah tangga*” , begitu ia mulia, seperti dikatakan “ *wanita adalah tiang pancang negara*’ . Kalau tiang pancangnya sudah rusak , bagaimana negaranya? Tidak ada yang mempermasalahkan kaum pria harus begini, wanita harus begitu. Dari kecil sudah meyakini, katakanlah puspa dharma, tugas dan kewajibannya sudah tahu. Wanita tidak selalu di rumah, wanita dituntut untuk bekerja dan bekerja. Sabda suci mengatakan’ *aku melebur dalam diri alam, tirulah aku. Karena itu kau juga harus bekerja, seandainya aku tidak bekerja, bagaimana dengan dunia?*’ ³⁰

Pendapat di atas didukung dengan pernyataan tokoh agama Budha, Bikhu Yana Kirti :

³⁰ Retno Wulandari, *Diskursus Gender di Kalangan Pemuka Agama*, (Skripsi, FISIP Unair, 2001), hlm. 64 - 65

“ Tidak masalah, selain mereka mampu melakukan tugas dan kewajiban sebagai dharma, moralitas dan kebajikan, tidak ada pembagian kerja dimana laki-laki di luar dan perempuan di rumah. Nilai spiritual seseorang mencapai *arahat* harus dalam wujud laki-laki. Dalam agama Budha dikenal reinkarnasi.”³¹

Dari pendapat beberapa tokoh agama tersebut terlihat bahwa perempuan tidak dibedakan dalam wilayah pembagian kerjanya dengan laki-laki. Hanya perbedaan terjadi dalam peranan mereka dalam rumah tangga, dimana secara kodrati, wanita haruslah menjadi seorang ibu dan laki-laki adalah kepala rumah tangga.

2. Diskriminasi

Indonesia pada 18 tahun yang lalu resmi meratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on The Elimination of all Form of Discrimination / CEDAW*) melalui Undang-undang (UU) Nomor 7 tahun 1984 tanggal 24 Juli 1984. Keluarnya undang-undang yang terdiri dari 2 pasal itu merupakan tonggak pengakuan negara bahwa negara wajib menjamin tidak terjadi perbedaan berdasarkan jenis kelamin yang mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologi, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.³²

Pasal 1 Konvensi menyebutkan, untuk tujuan konvensi ‘ istilah diskriminasi terhadap perempuan’ berarti *setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin*, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh

³¹ *ibid*

³² *Kompas*, 19 Agustus 2002

kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Meskipun negara telah menjamin tidak ada diskriminasi terhadap perempuan, tetapi negara tetap dan terus melakukan tindakan pembedaan berdasarkan jenis kelamin. Sampai sekarang, menurut catatan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan, polisi masih menganggap kekerasan di rumah tangga adalah persoalan domestik, sehingga tidak mau ikut campur. Perkosaan menurut pasal 258 Hukum Pidana adalah “ Setiap orang yang dengan menggunakan kekerasan, memaksa perempuan untuk melakukan hubungan seksual dengannya di luar nikah, karena telah melakukan perkosaan, akan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun” . Definisi ini jelas-jelas tidak memasukkan bentuk pemaksaan seksual lainnya sebagai perkosaan, dan juga lebih menekankan sifat seksualnya, bukan kekerasannya.³³

Dalam sistem patriarki yang ada di masyarakat, seringkali perempuan dihargai lewat tubuhnya. Sebagai anak perempuan, biasanya tidak pernah benar-benar dirasakan kehadirannya oleh orangtuanya, kecuali harapan mendapatkan imbalan mas kawin ketika anaknya menikah. Bersekolah pun tidak boleh, karena sekolah bukan untuk anak perempuan.

Dalam sistem yang kapitalistik, menurut Nasikun (1992), kaum wanita miskin umumnya akan berada di dalam posisi sebagai obyek sistem eksploitasi tiga lapis. *Pertama*, pada tingkat global, sebagai mayoritas warga masyarakat negara pinggiran, kaum wanita akan menjadi korban kesenjangan dan ketidakadilan sistem internasional. *Kedua*, pada tingkat produksi, sebagai bagian terbesar lapisan bawah dari sistem stratifikasi

³³ *Ibid*

kerja industrial, kaum wanita akan menjadi korban pertama dari kesenjangan hubungan-hubungan industri kapitalis. *Ketiga, pada tingkat societal*, kaum wanita juga harus mengalami perlakuan yang tidak adil dari struktur dan ideologi *gender* yang telah berabad lamanya.³⁴

Pengalaman di berbagai negara seperti Bangladesh, Haiti dan Indonesia yang menerapkan model pembangunan yang kapitalistik, dimana dengan logika utama selalu berusaha memaksimalkan keuntungan, telah banyak membuktikan bahwa kaum wanita acapkali terpojok dalam posisi paling lemah, tereksploitasi dan tidak memiliki *bargaining power* yang kuat terhadap kelas sosial di atasnya akibat proses modernisasi dan industrialisasi.

Menurut Bakaruddin R. Akhmad, intelektual Islam, seorang peneliti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, berpendapat bahwa perempuan (dicontohkan melalui masyarakat Sumatra Barat setelah kembali dalam otonomi daerah), masih menduduki posisi warga negara kelas dua dalam politik lokal.³⁵ Terdapat bias gender dalam bidang pendidikan dimana makin tinggi tingkat pendidikan, persentase perempuan makin kecil, sekurang-kurangnya hal inilah yang menyebabkan sedikitnya perempuan dalam konstelasi politik lokal. Penyebab lain adalah karena kurangnya pengalaman akibat *pengaruh budaya*, sehingga wanita memilih menerima posisi mereka baik dalam partai politik, parlemen dan birokrasi karena pengaruh laki-laki. Jika wanita menempati posisi strategis dalam politik lebih disebabkan karena pilihan laki-laki demi keseimbangan atau alasan-alasan sejenis.

³⁴ Bagong Suyanto, Emy Susanti Hendrarso, *Wanita dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan*, (Surabaya, Airlangga University Press, 1996), hlm. 62

³⁵ *Kompas*, 15 April 2002

Hal di atas bisa dicontohkan dari kunjungan Presiden Megawati ke Korea Selatan dan Korea Utara pada bulan Maret dan April 2002 dimana hubungan kedua negara tersebut tidak begitu baik. Keberhasilan Megawati dalam melakukan diplomasi langsung dari utara ke selatan tersebut ternyata bukan semata-mata disebabkan oleh kemampuan yang dimilikinya, tetapi lebih karena latar belakang pertemanan Presiden Sukarno, ayah Mega, dengan para pemimpin di kedua negara tersebut di masa lalu.³⁶ Keadaan semacam ini yang seringkali menyebabkan perempuan tidak banyak mendapatkan kepercayaan untuk berperan dalam berbagai bidang.

Dalam kehidupan ekonomipun, perempuan menjadi warga kelas dua. Hal ini seperti diungkapkan oleh Ny. Hj. Zainab Zakky, Ketua I PC Muslimat NU Kab. Pasuruan. Ia berpendapat, di beberapa desa di Indonesia sebenarnya perempuan mempunyai potensi ekonomi yang tinggi (dalam hal ini mampu membuat berbagai kerajinan dan ketrampilan lain), tetapi seringkali tidak dikembangkan karena terbatasnya kemampuan mereka. Mereka lebih menunggu uluran tangan pihak lain dalam mengembangkan usaha.³⁷

Kaum wanita yang secara ekonomi rentan dan tidak memiliki ketrampilan yang cukup, mereka kebanyakan tidak dapat ikut terserap di dalam sektor modern yang serba padat modal dan menekankan efisiensi. Kalaupun kaum wanita miskin yang kurang berpendidikan itu dapat ikut mengisi peluang di sektor industri, biasanya hanya terbatas di tenaga kasar sebagai buruh dengan upah harian, mingguan atau bulanan yang *relatif* kecil.³⁸

³⁶ Kompas, 3 April 2002

³⁷ Surabaya Pos, 2 April 2002

³⁸ Bagong Suyanto, Emy Susanti Hendrarso, *op.cit.*, hlm. 63

Kelompok Kerja *Convention Watch* dari Program Studi Kajian Wanita dan Gender, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, menemukan beberapa hal, seperti yang diungkapkan oleh Prof. Dr. Tapi Omas Ihromi, pengajar Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, pemberi kerja mendiskriminasi pekerja ataupun calon pekerja perempuan. Bentuk diskriminasi itu antara lain tuntutan lajang, dan setelah diterima bekerja pun mereka tidak boleh menikah untuk jangka waktu tertentu. Sementara hal tersebut tidak diberlakukan kepada laki-laki.³⁹

Menurut Mochtar W. Oetomo, intelektual Islam, perempuan saat ini mendapatkan ancaman yang lebih berat, dimana bukan sekedar kultur patriarki dengan segala dominasi laki-laki, melainkan ancaman berupa *criminalis perfectus*, yaitu sebuah kejahatan yang bisa menyembunyikan segala bentuk kejahatan dengan sempurna, sehingga kejahatan itu tak tampak sebagai kejahatan.⁴⁰ Dalam *Criminalis Perfectus* orang disubordinasikan tapi justru merasa terpuja, didomestikkan tapi merasa tersanjung, dilecehkan tetapi merasa dijadikan ratu. Ancaman baru itu adalah *televisi*. Ia tidak melakukan pelecehan seksual secara fisik seperti laki-laki, tapi melakukannya ke kognisi dan imaji. Hal ini yang disebut sebagai *kekerasan simbolik* dan *kekerasan semiotik*. *Kekerasan simbolik* adalah bentuk kekerasan melalui proses simbolisasi terhadap perempuan dengan cara-cara yang wajar dan rujukan-rujukan yang absah hingga pada akhirnya simbol itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Kecantikan digunakan sebagai daya tarik berbagai acara televisi, tetapi hal ini dianggap sebagai sebuah kebenaran dan sebagai sesuatu yang wajar. Sedangkan *kekerasan semiotik* adalah se bentuk kekerasan terhadap perempuan melalui ungkapan-ungkapan dan bahasa yang memiliki rujukan struktur (cultural,

³⁹ Kompas, 19 Agustus 2002

religi) serta rujukan kontekstual, hingga bahasa itu nampak menjadi wajar dan absah. Ungkapan-ungkapan verbal dan menjurus dalam berbagai pentas lawak adalah bentuk kekerasan ini. Tetapi kita yang melihat justru menanggapinya dengan tertawa dan menikmatinya sebagai sesuatu yang lucu.

Ancaman di atas juga ditegaskan kembali oleh *Sadawi* dalam bukunya *Perempuan di Titik Nol*, judul asli *Women at Point Zero* karangan penulis Mesir *Nawal el-Sadaawi*, disebutkan bahwa perempuan diposisikan dihargai lewat tubuhnya.⁴¹ Dalam situasi saat ini, hal tersebut bisa digambarkan dalam berbagai penayangan iklan. Dimana produk-produk yang diluncurkan untuk masyarakat dikampanyekan lewat pemunculan iklan yang menjadikan wanita sebagai model dengan mengedankan eksploitasi bagian tubuh mereka. Ketika berhadapan dengan negara, tubuh perempuan pula yang dimanfaatkan untuk mengontrol masyarakat melalui program Keluarga Berencana yang menempatkan perempuan sebagai sasaran utama. Saadawi sendiri sebagai penulis Mesir, seringkali menghasilkan karya-karya yang kritis terhadap masyarakatnya. Ia menegaskan bahwa dalam Islam tidak membenarkan adanya kekerasan pada wanita, tapi justru banyak tokoh agama Islam yang melakukan kekerasan terhadap istrinya. Sehingga ia mengharapkan adanya pemisahan dalam memandang Islam sebagai firman Tuhan dan umat sebagai pemeluk agama Islam.

Menurut *Hafidz* (1991), kadang tampak beberapa kontradiksi dalam Islam (atau dalam penginterpretasiannya). Di satu pihak disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan berasal "dari satu dzat" dan bahwa laki dan perempuan berada dalam kedudukan yang sama, tapi di lain pihak kaum laki-laki boleh menindak istrinya apabila menunjukkan pembangkangan

⁴⁰ *Surabaya Pos*, 22 April 2002

(Surat 4 ayat 34); atau bahwa kaum perempuan harus tetap di rumah agar tidak kembali ke jaman jahilliyah sebelumnya (Surat 33 ayat 33); atau bahwa pembagian warisan kepada anak lelaki sama dengan dua anak perempuan (Surat 4 ayat 11).⁴²

Menurut *Ratna Saptari*, poligami dalam Islam mengasumsikan bahwa laki-laki mempunyai dorongan seksual yang besar yang harus disalurkan sehingga laki-laki diperbolehkan kawin dengan paling banyak empat perempuan, tetapi juga dianjurkan menjaga keseimbangan di antara mereka agar tak timbul konflik-konflik sosial. Seorang perempuan hanya boleh kawin dengan satu laki-laki, dan kadang harus membaginya dengan perempuan lainnya yang juga menjadi istri suaminya.⁴³

Menurut *Pinky Saptandari* yang meneliti masyarakat nelayan, keterbatasan peran wanita dalam kehidupan sosial dan agama dapat dilihat pula pada masyarakat nelayan, dimana dikenal dengan istilah *tabu haid*.⁴⁴ Berdasarkan informasi yang berhasil dikumpulkan, ada beberapa tabu haid dalam masyarakat nelayan pantai: (1). Larangan untuk berhubungan seksual; (2). Larangan melaksanakan ibadah sholat; (3). Larangan membaca Al Qur' an; (4). Larangan memandikan jenasah; (5). Larangan puasa; (6). Larangan ziarah ke kubur; (7). Larangan untuk tidur siang; (8). Pantangan minum es atau air dingin; (9). Pantangan makan-makanan yang pedas; (10). Pantangan makan-makanan yang berbau amis; (11). Larangan untuk dipijat walaupun badan merasa pegal.

⁴¹ *Kompas*, 15 April 2002

⁴² Ratna Saptari, Brigitte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*, (Jakarta, Kalyanamitra, 1997), hlm. 216.

⁴³ *Ibid*, hlm. 215

⁴⁴ Bagong Suyanto, Emy Susanti Hendrarso, *op.cit.*, hlm 112

Berbagai tabu haid tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu *tabu haid dalam kegiatan agama* dan *tabu haid dalam kesehatan*. Terdapat perbedaan pada besarnya kepercayaan dan kepatuhan istri nelayan terhadap berbagai tabu haid. Tabu haid dalam kegiatan agama sangat dipatuhi dibandingkan tabu dalam kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap aturan agama (Islam) lebih tinggi dan cenderung mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Tetapi walaupun dikenal adanya tabu haid, tetapi masih banyak yang melaksanakan selamatan guna menandai anak gadis yang mengalami haid pertama kali.

Walaupun ada bukti dalam sepanjang sejarah Kristen, dimana perempuan memainkan peran kepemimpinan dalam komunitasnya, tradisi Kristen menentang gagasan tersebut. Perdebatan tentang pendeta perempuan menghasilkan pelbagai macam alasan mengapa perempuan seharusnya tidak ditasbihkan. Banyak alasan yang menunjuk kepada perbedaan biologis dasar perempuan, dan peran melahirkannya, maupun kepada sejarah dan tradisi.⁴⁵

Menurut *Egbert Adriaan Boerenbeker*, dalam disertasinya dijelaskan, dalam agama Hindu, walaupun para wanita mempunyai hak yang sama menjadi imam (*padanda*), tetapi mereka masih mendapatkan ketidakadilan dalam mendapatkan posisi tersebut. Dimana mereka seringkali mendapat paksaan utamanya dari suami mereka untuk menerima posisi menjadi *padanda*. Umumnya mereka adalah istri dari pria yang telah mendapatkan pentahbisan sebagai imam dan kemudian meminta pada istrinya supaya bersedia menerima pentahbisan itu juga. Jika istrinya menolak, maka calon imam itu harus menceraikannya.

⁴⁵ Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta, Rifka Anissa Women's Crisis Centre dan Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 85.

Pada zaman raja-raja Lombok, seorang wanita Brahmana yang menolak untuk menerima pentahbisan bersama suaminya, akan diserahkan kepada raja, lalu kemudian dibuang; sedangkan wanita yang bukan Brahmana dalam hal ini akan dibunuh.⁴⁶

Imam Hindu wanita yang kawin dengan seorang Brahmana yang bukan imam, tidak boleh membaca buku Weda, menyiapkan kurban-kurban atau membagikan air suci. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh pergaulannya dengan pria yang tidak suci, hingga ia sendiri tidak suci lagi dan tidak dapat menyelenggarakan upacara-upacara. Istri dari imam yang berkelakuan buruk dan kasar, dapat dinyatakan keluar dari martabat keimanannya, berdasarkan wewenang yang hanya terdapat pada nabe, guru atau penggantinya bila nabe atau guru itu sudah meninggal. Selain itu, jika kemudian mereka menjadi janda, mereka tidak boleh menikah lagi, karena siapa yang sudah ditahbiskan menjadi imam umumnya tidak boleh menikah lagi.

Selain itu, bagi perempuan Hindu, ada sejarah tentang tulisan negatif dan kritis mengenai jenis kelamin mereka. Menurut *Manu*, dictum pemberi hukum yang banyak dikutip “ *sejak ayunan hingga liang lahat seorang perempuan tergantung pada laki-laki; di masa kanak-kanak tergantung pada ayahnya; di masa muda kepada suaminya; di masa tua kepada anak laki-lakinya* ”, tidak begitu jauh dengan kenyataan jutaan perempuan Hindu.⁴⁷

Nilai-nilai keagamaan dalam Hinduisme didasarkan atas empat dalil : *moksa*, yang menekankan *renunciation*; *dharma* yang menekankan kesucian dan kebersihan; *artha* yang menekankan keberhasilan duniawi; *karma* yang berarti kepuasan seksual. Keempat dalil ini menjadi dasar dari berbagai

⁴⁶ Maria Ulfah Subadio, SH, Prof. Dr. T.O. Ihromi, SH, *op.cit*, hlm. 268.

stereotype tentang perempuan yang beraneka ragam dan bertentangan, seperti perawan suci, penggoda seksual, istri penurut, ibu yang dihormati, janda yang ditakuti, perempuan tidak suci, partner seks yang perkasa. Pada saat yang bersamaan perempuan dilihat sebagai sumber kehidupan (disimbolkan bentuk Dewi Sri untuk ritual-ritual pada saat panen).⁴⁸ Satu hal yang amat jelas dalam Hinduisme, sebagaimana juga agama lainnya, ialah ambiguitas pandangan tentang posisi perempuan.

Dalam agama Budha, dunia nyata dilihat sebagai penuh dengan penderitaan, ketidaktetapan dan kesementaraan, sedangkan dunia spiritual dipercaya sebagai dunia yang menjadi tujuan setiap makhluk Budha, yaitu lepas dari penderitaan atau lepas dari ikatan dunia nyata. Segala nafsu atau dorongan – dorongan biologis merupakan cerminan dari keterikatan dengan dunia nyata dan menjadi antitesis dari emansipasi spiritual. Perempuan dianggap sebagai sumber kemunculan nafsu biologis; dengan demikian menghambat terlepasnya seseorang dari dunia nyata, dan dari penderitaan dan kebodohan. Dasar dari kontradiksi ini muncul pada saat seksualitas perempuan (bukan laki-laki) dilihat sebagai sumber kesesatan, tetapi pada saat yang sama pula poligami dan pelacuran disahkan. Poligami disahkan karena pentingnya penguasaan atas kerja perempuan dan kontribusinya terhadap rumah tangga, selain untuk memenuhi kebutuhan seksual laki-laki. Sedangkan prostitusi disahkan karena secara praktis pelayanan seksual bisa dilakukan tanpa ikatan sosial. Secara ideologis, pelacur dianggap sebagai perwujudan ketidaksempurnaan *karma* (pencerminan perilaku dalam hidup yang lampau), atau ketidakmurnian *karma* yang berarti bukan merupakan sesuatu yang dikecam.⁴⁹

⁴⁷ Julia Cleves Mosse, *op.cit.*, hlm. 85

⁴⁸ Ratna Saptari, Brigitte Holzner, *op.cit.*, hlm. 217

⁴⁹ *ibid.*, hlm. 216

Diskriminasi terhadap wanita juga terjadi di daerah konflik di Indonesia (antara lain Aceh, Ambon dan Papua). Posisi perempuan yang lemah secara adat dan agama makin menyudutkan perempuan di daerah tersebut. Mereka tidak hanya menjadi korban kekerasan, seperti dianiaya dan diperkosa, tetapi juga harus menjadi orangtua tunggal yang tidak hanya mengasuh anak, tetapi juga mencari nafkah karena suaminya hilang atau meninggal. Tidak jarang pula mereka disiksa agar memberikan informasi, seperti diludahi, ditelanjangi, diarak, disundut rokok dan disetrum. Penghinaan dan penyiksaan ini bisa dilakukan oleh semua pihak. Perempuan menjadi obyek dan target pelampiasan. Untuk itu beberapa tokoh berbagai agama seperti dra. Hj. Sinta Nuriyah Wahid (Islam), Pendeta Lies Sigilipu Saino (Kristen), Dr. Margaretta Hendriks (Gerakan Perempuan Peduli Ambon) dan Siti Soltief (aktivis AIDS Papua) menginginkan diadakannya rekonstruksi tradisi dan adat, juga reinterpretasi dan dekonstruksi pemahaman keagamaan, agar konflik bisa diselesaikan dan penghargaan terhadap hak-hak perempuan dikembangkan.⁵⁰

Kritik terhadap diskriminasi wanita juga dikemukakan oleh beberapa tokoh agama lain. Seperti yang dikemukakan oleh Pandhite Gede Anom.

“...Hindu tidak ada masalah, beberapa kali raja-raja di Indonesia itu perempuan semua, antara gender terdapat perbedaan perlakuan terhadap perempuan karena adanya perbedaan pandangan terhadap gender. Ada yang mengatakan waktu Megawati mau Presiden, “*tidak bisa jadi Presiden*”, sekarang perempuan bisa jadi presiden. Di Hindu, boleh, tidak ada perbedaan. Memang kadang karena budaya, agama, sehingga sudut pandang terpolarisasi seperti itu, namun seringkali mungkin tidak ada agama yang diskriminatif. Wanita dalam rumah tangga menjadi kepala rumah tangga dan lebih luas lagi menjadi tiang pancang negara...”⁵¹

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bikhu Yana Kirti (Budha):

⁵⁰ Kompas, 26 Agustus 2002

⁵¹ Retno Wulandari, *op.cit*, hlm. 66

“ Tidak setuju (adanya diskriminasi), seseorang terlahir sebagai manusia tergantung dari karma atau perbuatan masing-masing. Seseorang terlahir sebagai wanita terjadi pembagian peran, berarti ada pemikiran yang salah. Siapapun boleh melakukan (memimpin) apapun, sama kedudukan laki-laki dan perempuan.”⁵²

Pendapat ini diperkuat dengan ungkapan KH Hasyim Abbas :

“ Kedudukan (wanita) sama dalam hal-hal yang umum, namun dalam beberapa hal ia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda”⁵³

Pendapat seorang tokoh Islam, M. Najib lain lagi. Ia lebih mempertegas adanya batasan-batasan tertentu pada wanita. Hal ini seperti pendapatnya sebagai berikut :

“ Kepatuhan perempuan tidak harus menjadi sub ordinat, dalam keluarga laki-laki sebagai kepala keluarga posisinya seorang pemimpin, pada tataran masyarakat itu berlaku umum. Itu bukan berarti sub ordinat. Posisinya setara, karena ia bukan kepala keluarga, ia harus patuh kepada kepala keluarga, toh bila kepala keluarga tidak ada, ia mengambil alih kewenangan kepala keluarga. Itu bertanda wanita tidak sub ordinat...”⁵⁴

Dari pendapat-pendapat di atas terlihat bahwa perempuan tetap mempunyai kesempatan untuk memimpin dalam berbagai bidang, tetapi hal ini berbeda dengan keberadaan mereka dalam keluarga. Pada dasarnya perempuan tetap mempunyai kewajiban untuk tunduk dan patuh kepada laki-laki (suami). Perempuan bisa memimpin jika laki-laki tidak ada di rumah.

Terlihat bahwa di satu sisi dalam sebagian besar agama berkembang gerakan liberal, ada tarikan yang sama kuatnya ke arah fundamentalisme. Fundamentalisme cenderung menekankan perbedaan perempuan dan, baik

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*, hlm. 67

⁵⁴ *Ibid*

di gereja-gereja AS ataupun masjid-masjid Iran, mengklaim sanksi ketuhanan bagi peran gender yang terpolarisasi.⁵⁵

3. Keadilan dan Kesetaraan Gender

Kaum feminis Kristen, Yahudi dan Islam meneliti kembali ayat suci mereka, dan tiba pada kesimpulan bahwa agamanya menawarkan kemungkinan pembebasan dan perbaikan dalam posisi perempuan, tetapi tradisi dan sejarah telah menumbangkan potensi ini dan menggunakan agama untuk menekan perempuan. Sarjana lain menunjukkan fakta bahwa dalam beberapa hal hampir semua agama menawarkan kesempatan kepada perempuan untuk menjalankan kekuasaan, khususnya melalui tradisi mistik. Dalam Islam perempuan memberi sumbangan penting dalam sufisme, dan ada beberapa perempuan ternama dalam mistik Kristen.⁵⁶

Di kalangan Islam sendiri permasalahan kesetaraan gender atau lebih khususnya mengenai peran perempuan, masih menjadi kontroversi. Misalnya saja di Mesir, gerakan feminisme terpolarisasi menjadi dua yaitu : (1) *Westernisasi*, tokohnya adalah Lutfi Sayyid, Qasim Amin, Huda Sya' rawi dan lain-lain. Substansi dari gerakan ini adalah kemerdekaan perempuan , pendidikan, hijab, hak cerai, poligami, hak waris, kesaksian, perempuan karir, kepemimpinan perempuan dan HAM. Intinya menuntut persamaan antara laki-laki dan perempuan agar sama-sama mempunyai hak dan kewajiban dalam membangun bangsa; (2). *Pemikir Islam Mesir*. Di sini terbagi menjadi dua yaitu *Islam Konservatif* dan *Islam Reformis*. Bagi *Islam Konservatif*, perempuan tidak boleh memegang jabatan umum, termasuk di parlemen, apalagi presiden. Tugas mereka hanya di rumah, bukan publik. Bagi mereka, ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan secara sosial maupun hukum adalah takdir Tuhan. Pandangan ini masih dianut oleh

⁵⁵ Julia Cleves Mosse, *op.cit*, hlm. 86

masyarakat tradisional (pedesaan). Sedangkan *Islam Reformis* melihat perlunya membuang belenggu tradisi yang selama ini diasumsikan dari Islam. Kritik Islam Reformis tidak hanya ditujukan pada tradisi pengekangan perempuan, tapi juga pada *westernism* dan sekulerisme yang radikal. Perempuan memang harus diberikan peran publik, namun tidak melupakan fungsinya sebagai ibu yang mempersiapkan generasi unggulan (*ummu al-madrasah*). Namun di Mesir saat ini baru sebagian perempuan perkotaan yang bisa menikmati keadilan gender, walaupun isu itu sudah lama digulirkan.⁵⁷

Menurut Maksun Faiz, dalam masyarakat Islam terdapat perbedaan pandangan tentang pelopor pemikiran keadilan gender di dunia Islam-modern. Sebagian orang melihat Mesir yang memulai.⁵⁸ Lahirnya gagasan *tahrir al-mar' ah* (feminisme Islam) di Mesir sangat berkait dengan : (a). kondisi perempuan yang terpinggirkan saat itu di dunia Islam; (b) karena terobsesi dengan kemerdekaan dan kemajuan perempuan di Eropa. Keterbelakangan perempuan dan kediktatoran penguasa saat itu memiliki korelasi signifikan. Dalam konteks sosiologis, saat itu perempuan memang menjadi anggota masyarakat kelas dua. Mayoritas perempuan terkungkung dalam empat dinding rumahnya. Sehingga kaum perempuan perlu dimerdekakan dari kungkungan tradisinya yang membodohkan. Kebodohan hanya akan melahirkan perbudakan, adapun ilmu akan melahirkan kemerdekaan (*hurriyah*).

Menurut *Wacana Teologi Feminis Muslim* yang disampaikan oleh *Ghazala Anwar*, ia memandang feminisme sebagai sebuah gerakan di dalam gerakan umum untuk memulihkan martabat, kebebasan, dan kesetaraan

⁵⁶ *ibid*

⁵⁷ *Kompas*, 18 Maret 2002

⁵⁸ *Surabaya Pos*, 19 April 2002

bukan saja diantara manusia melainkan juga diantara semua makhluk yang mendiami bumi ini. Tidak ada konflik antara pemahaman yang dimilikinya tentang Islam, sebagai perdamaian, sebagai ketiadaan kekurangan, dengan pemahamannya tentang feminisme. Namun ada rentangan pemahaman tentang apa yang membentuk Islam dan apa yang menyusun feminisme. Disini ia berbicara dalam arti yang sangat luas, saat ia memilih istilah 'feminis' sebagai orang yang menjadikan kesejahteraan hidup perempuan sebagai kepedulian utama dalam kehidupannya sendiri - 'feminis' -- ini bisa perempuan bisa juga laki-laki. Barangkali tidak ada pembedaan yang jelas antara 'perempuan' dengan 'laki-laki'. Saya mengadopsi praktik tradisional dalam mengkategorikan tiap manusia sebagai laki-laki atau perempuan, dengan alasan sederhana, yakni karena inilah praktik yang diterima oleh semua orang.

Para feminis dewasa ini merenungkan berbagai aspek keberadaan perempuan Muslim dari berbagai sudut pandang. Dan kecenderungan utama di kalangan Muslim terpelajar yang memperoleh pendidikan Barat, dalam menangani persoalan-persoalan penindasan berdasarkan gender dalam tradisi-tradisi dan masyarakat. Tanggapan-tanggapan para feminis ini dapat dikategorikan dengan merujuk pada teks-teks otoritatif, yakni Al-Qur' an dan Hadist, serta hukum yang diklaim sebagai sesuatu yang diturunkan dari kedua sumber otoritas itu.⁵⁹

Tanggapan-tanggapan terhadap persoalan di atas, bisa digolongkan menjadi :⁶⁰

- o **Tanggapan Apologis**

Tanggapan ini membuat dua pembedaan. *Pertama*, ada perbedaan yang tak bisa dipungkiri antara kebutuhan dan keinginan laki-laki

⁵⁹ Zakiyuddin Baidhawiy, (ed), *Wacana Teologi Feminis*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 4 - 7



dengan kebutuhan dan keinginan perempuan, yang dipahami dan dilayani oleh ayat-ayat dalam Al-Qur' an. *Kedua*, praktik umum dalam berbagai komunitas Muslim menyalahi atau tidak memenuhi seluruh hak bagi perempuan sebagaimana telah tersurat dalam teks-teks otoritatif (Al-Qur' an dan Hadist).

Namun, mereka juga bersikeras menyatakan bahwa Al-Qur' an telah memberikan hak-hak tertentu kepada perempuan, yang tidak disadari oleh perempuan itu sendiri, serta bahwa laki-laki telah merampas hak-hak itu dari mereka atau bahwa mereka sendiri telah menyerahkan hak-hak itu kepada laki-laki akibat ketidakpahaman terhadap Al-Qur' an. Mereka kemudian mengupayakan pengembalian hak-hak yang telah dirampas itu sesuai dengan ketetapan Al-Qur' an, dan dalam beberapa kasus ini berarti peningkatan kondisi perempuan yang bersangkutan.

o **Tanggapan Rasionalis**

Beberapa feminis Muslim, seperti Riffat Hassan dari Pakistan, menyatakan bahwa karena Allah itu Maha Adil dan Maha Pengasih, maka kata-kataNya hanya bisa ditafsirkan dalam istilah-istilah yang selaras dengan kualitas-kualitas Ilahi tersebut. Pandangan ini tentu saja berarti menerapkan kriteria keadilan kepada Al-Qur' an ketimbang sekedar menerima begitu saja bahwa Al-Qur' an pastilah adil. Atau, ia mengambil pandangan tentang keadilan yang dikembangkan dalam sebagian ayat-ayat Al-Qur' an serta menggunakannya untuk menilai ayat-ayat lain yang tampaknya mengguncangkan pandangan tentang keadilan itu.

Bentuk rasionalisme lain dikembangkan oleh Fazlur Rahman. Ia menunjukkan adanya kebutuhan bagi perenungan filosofis demi

⁶⁰ *ibid*, hlm. 7 - 13

menemukan kerangka kerja teoretis baru bagi hukum Islam. Rahman mengeluh bahwa pendekatan para ahli hukum Islam awal terpecah-pecah (fragmentaristis). Mereka menangani sepotong demi sepotong aturan hukum berdasarkan ayat-ayat tertentu, bukannya mengambil prinsip-prinsip etika dari Al-Qur' an dan kemudian menjadikannya sebagai landasan tata peraturan yang menyeluruh. Fazlur Rahman menekankan kebutuhan untuk membangun sebuah teologi Islam yang berdasarkan Al-Qur' an. Teologi ini akan membentuk landasan bagi etika Islami, yang juga akan berdasar pada Al-Qur' an. Etika ini pada gilirannya menyediakan kerangka kerja dimana berbagai sistem hukum Islam dapat dikembangkan. Sebagai seorang rasionalis sekaligus modernis, Rahman sendiri menulis artikel-artikel tentang beberapa persoalan hukum yang berkaitan dengan perempuan, menafsirkan ayat-ayat Al-Qur' an yang relevan dengan cara pandangannya yang liberal.

o **Tanggapan Rejeksionis**

Tasleema Nasreen dari Bangladesh adalah seorang feminis Rejeksionis. Di depan umum, ia telah menyatakan adanya kebutuhan untuk merevisi atau menolak sebagian ayat Al-Qur' an yang dianggapnya misoginis (membenci perempuan) atau seksis. Saya mendapati opini yang dinyatakan oleh Nasreen secara terbuka dalam berbagai obrolan pribadi antar perempuan. Bagaimanapun, mengambil posisi semacam itu di depan umum memerlukan keberanian besar, terutama mengingat iklim politik di berbagai negara Muslim, dan menurut beberapa perempuan Muslim, posisi Nasreen merugikan gerakan feminis di berbagai negara. Namun saya mendukung tindakan Nasreen, sejauh ia mengungkapkan kebebasan manusia untuk menentukan pilihan sendiri atas martabatnya, bahkan pun bila pilihan

itu dianggap melawan kehendak Allah oleh kebanyakan orang-orang yang mengelilingi sang protagonis. Kontroversi internasional seputar *Satanic Verses* (Ayat-ayat Setan) tulisan Salman Rushdie serta pernyataan-pernyataan Tasleema Nasreen tampaknya mengisyaratkan bahwa sikap-sikap umat Muslim terhadap konsep pewahyuan itu sendiri barangkali sedang menuju pembaharuan.

Sebagai reaksi terhadap posisi wanita yang lebih dianggap sebagai warga kelas dua dalam berbagai bidang, pada awal abad ini marak dengan diorganisasikannya protes, demonstrasi, pemogokan buruh dan kampanye persamaan hak dan menentang penindasan terhadap buruh perempuan. Bangkitnya perempuan sebagai buruh yang tertindas merupakan buah dari perubahan sosial itu sendiri, berkembangnya modal dimana sesungguhnya buruh merupakan penggerak perkembangan yang sekaligus diisap olehnya.

Kesadaran akan tertindasnya kaum perempuan dan sifat struktural penindasan itu sudah lama muncul di Indonesia.⁶¹ Pada awal abad ini, seiring munculnya kesadaran baru mengenai kolonialisme, muncul RA Kartini, seorang putri bupati Jawa yang melalui tulisan-tulisannya menentang poligami, kawin paksa dan penindasan feodal serta kolonial. Ia berusaha menegakkan hak kaum perempuan untuk bersekolah dengan mendirikan sekolah bagi anak-anak perempuan. Kemudian muncul banyak perempuan yang dengan kesadarannya tentang ketertindasan kaum perempuan, aktif dalam politik pergerakan nasional. Pada masa revolusi, organisasi-organisasi perempuan seperti Perwari, Wanita Indonesia, Pemuda Putri Indonesia, Aisyiah, Gerwis (Gerakan Wanita Sedar) dan sebagainya membentuk federasi organisasi perempuan (bukan wadah tunggal perempuan) yang dinamai Kowani (Kongres Wanita Indonesia). Meski

⁶¹ Kompas, 6 Maret 2002

persoalan utama Indonesia saat itu adalah perjuangan mengusir penjajah, gerakan sosial politik tidak didominasi pandangan nasionalisme sempit yang chauvinistic atau malah xenophobic. Watak internasionalis dilambangkan dalam Mukadimah UUD 1945, “ Kemerdekaan adalah hak segala bangsa....”

Brasil mengembangkan salah satu gerakan perempuan yang terbesar dan paling berhasil di Amerika Latin. Diawali dengan kenyataan bahwa perempuan kulit putih menyadari penghasilannya lebih rendah dibandingkan kaum pria. Bersamaan dengan itu, Gereja Katolik Brasilia perlahan-lahan mulai menentang rezim militer dan berpihak pada kaum miskin. Di bawah perlindungan gereja, ribuan perempuan muda militan ditarik bekerja di lingkungan perkotaan Brasil, dan ribuan kelompok perempuan kelas pekerja terbentuk, banyak diantaranya berasal dari lapisan perempuan dan komunitas yang berbasis Kristen, tetapi dengan cepat memiliki dinamika sosialnya sendiri.⁶²

Teologi yang dihasilkan oleh Perempuan Amerika Latin khususnya di Brasil, memiliki karakteristik khasnya sendiri, menjulang dari konteks sosial dan kegamaan dimana ia dikerjakan. *Pertama*, ia merupakan karya yang memantulkan posisi hegemonik (berpengaruh sangat besar) yang diduduki oleh Katolikisme disana, juga mencerminkan bidang-bidang yang tercakup dalam wacana serta praktik pastoral yang ditujukan kepada ‘ mereka yang diasingkan dari masyarakat’ atau yang secara umum disebut ‘ kaum miskin’ . Para teolog perempuan tidak menyusun metodologi mereka sendiri, mengikuti alur teologi pembebasan, mereka mulai dari pilihan bagi kaum miskin dan keikutsertaan dalam praksis pembebasan.

⁶² Julia Cleves Mosse, *op.cit*, hlm. 133

Sang Teolog asal Amerika Serikat, Beverley Harrison, juga menekankan kemenduaan (ambivalensi) dalam teologi pembebasan. Setelah meneguhkan solidaritas para feminis terhadap para teolog pembebasan, yang menganggap teologi sebagai renungan atau praksis, ia menyatakan: “ Namun kita juga mesti berkata kepada para warga Amerika Latin bahwa setiap kali Anda mengendus jejak kekuasaan, tak peduli apakah jejak itu berada didalam hirarki kependetaan atautkah dalam asosiasi-asosiasi teologis, dan setiap kali Anda menyatakan apa yang harus Anda katakan sehubungan dengan kekuasaan tadi, maka menilik cara Anda berbicara, perempuan tidak kelihatan.

Evaluasi metodologis atas ‘ kenyataan’ , yakni apa yang dilakukan oleh teologi pembebasan, membuka kemungkinan bagi para teolog perempuan untuk menggunakan pengalaman-pengalaman konkret perempuan sebagai ‘ kunci hermeneutis’ untuk membaca ulang Alkitab serta tradisi-tradisi keagamaan. Diluar itu, sebuah persoalan muncul saat kita mencoba mendefinisikan apa itu ‘ pengalaman perempuan’ . Ivone Gebara mengatakan: “ Dalam arus pemikiran progresif Amerika Latin baru-baru ini, dalam pendekatan mistis/kebijakan yang dikedepankannya, perempuan masih belum menerobos kedalamnya, dengan segala persamaan ataupun perbedaan diantara mereka. Pendobrakan oleh kaum miskin belum benar-benar menyatu secara mendalam dengan terobosan perempuan” . Dalam pemakaian Marxisme sebagai sebuah alat untuk menganalisis kenyataan, teologi pembebasan belum lagi menyerap kritik-kritik yang diajukan oleh para feminis beraliran sosialis—yang bisa dikatakan secara umum sebagai sebagian besar teologi yang dihasilkan oleh Amerika Latin. Artinya, dalam banyak teks teologis itu, penanganan masalah yang berkaitan dengan dominasi dan eksploitasi terhadap perempuan dalam masyarakat kontemporer kerap kali dilakukan dengan memakai analisis kelas reduksionis

sebagai modelnya. Hubungan-hubungan sosial dijenjang-jenjangkan, sementara hubungan-hubungan antarjenis kelamin, seperti halnya hubungan antar-ras, diletakkan dibawah (disubordinasi) hubungan-hubungan kelas sosial.

Model analisis semacam itu menghasilkan usulan-usulan dan rancangan-rancangan politis – serta rancangan praktik pastoral— dimana perjuangan-perjuangan dimasukkan dalam kategori umum atau khusus, kategori yang satu merupakan subordinat yang lain. Kategori khusus mencakup perjuangan-perjuangan perempuan dan ras. Sedangkan menggulingkan kapitalisme, sebagai sistem politik-ekonomi yang berlaku, dijadikan sebagai ‘ tugas utama’ teologi pembebasan. “ Umumnya perempuan diberitahu bahwa proses perubahan sosial membutuhkan prioritas-prioritas dan strategi-strategi. Dan kemudian mereka harus menunggu di ujung antrean untuk memperoleh pembebasan. Pada akhirnya, seperti dikatakan oleh Ruether, mereka harus ‘ menghilang’ , untuk melayani perjuangan-perjuangan lain yang tidak secara khusus merupakan perjuangan mereka sendiri.

Jadi, selain ‘ reduksionisme ekonomis’ yang disebutkan diatas, sejenis ‘ esensialisme biologis’ pun merambah sebagian besar teologi keluaran Amerika Latin. Secara rutin merujuk pada kualitas-kualitas perempuan yang mengagumkan sama sekali tidak berarti apa-apa kecuali meneguhkan apa yang dianggap sebagai ‘ hakikat keperempuanan’ atau ‘ pembawaan feminin’ . Dua teolog perempuan Brasil, Nancy C. Pereira dan Tania V. Sampaio, saat mengomentari apa kata para teolog pembebasan tentang karya-karya teologis perempuan, mengajak kita untuk menatap persoalan ini. Menurut kedua teolog tadi, memasukkan karya-karya teologi perempuan kedalam kriteria lebih dekat dengan kehidupan dalam hal

aktualitas serta nada puitisnya, sebagai kontras dengan wacana ‘ abstrak’ serta ‘ rasional’ yang dibuat oleh lelaki, benar-benar dapat memperkuat anggapan bahwa wacana rasional adalah wilayah khusus laki-laki – atau juga disebut wacana kompeten— sementara wacana ‘ lembut dan penuh perasaan’ merupakan wacana khas perempuan. Mereka bertanya; apakah tipe sumbangan teologis perempuan bukannya merupakan ‘ akibat dari kondisi mereka sebagai orang-orang yang tertindas dan dijauhkan dari perkembangan intelektual yang lebih rasional an abstrak?”⁶³

Dalam wacana apapun yang memuat rancangan untuk memasukkan perempuan secara efektif ke dalam Katolikisme mesti harus menumbangkan dulu struktur-struktur yang sudah ada, dengan cara mempengaruhi pilar utamanya, yakni pembedaan antara pejabat gereja dengan orang awam, yang hingga kini menyiratkan adanya kekuasaan suci di tangan pejabat gereja dan ketiadaan kekuasaan di pihak orang awam. Sebuah wacana yang sungguh-sungguh mengikutsertakan perempuan mesti disertai oleh kritik terhadap struktur-struktur patriarkal didalam masyarakat dan dalam gereja – dan karenanya menampilkan diri sebagai bentuk wacana yang mendekonstruksi seluruh kekuasaan laki-laki, dalam semua bidang sosial, termasuk bidang keagamaan dan bidang perlambangan atau simbolis.

Menurut *Wacana Teologi Feminis Gereja* yang dikemukakan oleh *Aruna Granadason*, dijelaskan bahwa Gereja tidak pernah bisa mengenali kekerasan patriarkal yang sudah ada dan terus berlangsung dalam masyarakat kita. Kristianitas, seperti juga agama-agama lain, nyatanya telah memberikan pengesahan dan membenaran teologis atas kekerasan itu dan karenanya menyetujuinya.⁶⁴

⁶³ Zakiyuddin Baidhawiy (Ed.), *op.cit.*, hal110-111

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 42.

Namun, secercah harapan menembus kenyataan-kenyataan buruk ini, yakni perempuan telah mulai berani bicara, mereka telah mencari ruang dan mengklaim hak-hak mereka untuk mencari sebuah pergeseran pola pikir (paradigma) dalam teologi. Perempuan menuntut keadilan dan menuntut sebuah dunia bebas kekerasan, dimana mereka dapat berperan serta secara kreatif dengan syarat-syarat yang mereka tetapkan sendiri.

Dalam konteks semacam itu, saat perempuan telah bangkit sebagai sebuah kekuatan terorganisasi di dalam tubuh gereja dan dalam masyarakat, diluncurkanlah Dekade Ekumenis Dewan Gereja-gereja Sedunia dalam Solidaritas terhadap Perempuan pada tahun 1988. Benih Dekade Persekutuan Gereja-gereja dalam Solidaritas terhadap Perempuan ditanam dengan dikeluarkannya maklumat Dekade Perempuan oleh Persatuan Bangsa-bangsa (1975-1985). Panitia Pusat Dewan Gereja-gereja Sedunia (*Central Committee of the World Council of Churches, WCC*), pada pertemuannya di tahun 1985, saat mendengarkan sebuah laporan tentang pencapaian-pencapaian yang diraih dalam Dekade Perempuan PBB, memutuskan bahwa gereja perlu memastikan adanya kelanjutan dari program PBB tadi. Komitmen seperti itu tampil dalam bentuk yang lebih nyata ketika dalam pertemuannya di tahun 1987 Panitia Pusat memutuskan untuk meninjau rancangan sebuah Dekade Solidaritas Gereja terhadap Perempuan – yang dipandang sebagai saat yang tepat bagi gereja untuk bertindak. Bukanlah suatu kebetulan bahwa Kelompok Kerja Penasihat Masalah Perempuan di dalam WCC, saat mengadakan pertemuan di Mahabalipuram, India, mengajukan usulan agar Pesan Paskah waktu itu dijadikan pemicu semangat bagi peluncuran Dekade Solidaritas Gereja terhadap Perempuan, dimulai sejak masa Paskah 1988. Titik pusat perhatian diarahkan kepada pertanyaan yang diajukan oleh perempuan kepada sesamanya: “Siapa yang akan menggulingkan batu pertama kali?”



Namun yang lebih penting adalah, bahwa perempuan-perempuan, khususnya yang menjadi jemaat gereja, telah menyambar kesempatan itu untuk mengungkap aspirasi-aspirasi mereka yang terdalam serta impian-impian mereka demi memastikan adanya tindakan gereja yang tanggap terhadap permasalahan. Inilah salah satu buah Dekade Ekumenis – kesempatan yang telah disediakan untuk perempuan untuk bersama-sama mengungkapkan pandangan-pandangan serta harapan-harapan mereka akan sebuah dunia yang lebih baik. Perempuan telah mulai mengenali kebersamaan dalam perjuangan mereka dan bergerak ke arah satu sama lain, saling merangkul, melampaui batas-batas buatan manusia. Hakikat perjuangan mereka yang mendunia telah ditunjukkan dengan jelas dalam dekade Ekumenis.

Dekade itu memusatkan perhatian pada pemberdayaan perempuan, hingga perempuan dapat menjadi penentu agenda kepedulian yang akan dilaksanakan oleh gereja. Keputusan tentang struktur-struktur mana saja yang perlu digugat dalam gereja mereka, negara mereka, dalam wilayah serta dunia mereka, tergantung pada perempuan sendiri. Meski demikian, ini adalah sebuah Dekade Gereja-gereja, bukan Dekade Perempuan, sehingga jelaslah bahwa perubahan-perubahan struktural hanya bisa terjadi pada saat seluruh masyarakat lelaki dan perempuan didalam gereja bersedia untuk bertindak penuh solidaritas dengan perempuan. Jika kenyataan ini sudah disadari, menjadi penting sekali bagi gereja untuk meneguhkan sumbangan-sumbangan kepemimpinan serta pengambilan keputusan yang dapat diberikan oleh perempuan dalam tugas-tugas yang menentukan dan dalam kehidupan teologis serta spiritual gereja. Tersirat didalamnya bahwa sekaranglah waktunya bagi gereja untuk secara hati-hati mengevaluasi pola-pola administrasi serta kependetaan agar mereka lebih bersifat

merangkul (inklusif) bakat-bakat serta kelebihan-kelebihan yang dimiliki perempuan, yang mereka ingin bawa kedalam kehidupan gereja.

Tak perlu dipertanyakan lagi, Dekade ini ditetapkan pada saat yang penting dalam sejarah gereja. Inilah saatnya perempuan siap menyuarakan cara-cara yang mesti ditempuh oleh gereja melalui proses kristalisasi dalam tindakan nyata, sebagian komitmennya pada perempuan. Kinilah waktunya perempuan merasa telah memperoleh pemberdayaan untuk berbicara terus terang mengenai pandangan-pandangan dan harapan-harapan mereka tentang masa depan gereja serta masa depan dunia. Sekarang tiba saatnya perempuan merasa mampu bergerak menjauhi keberadaan sebagai korban-korban penindasan, mendekati sebuah penemuan diri sebagai insan yang memiliki kekuatan untuk mengklaim kembali kehormatan diri serta menentukan nasib sendiri. Kini waktunya perempuan mampu menyatakan keimanan dan pengharapan mereka dalam berbagai cara kreatif dalam sebuah masyarakat yang baru, sebuah gereja yang baru.

Menurut Egbert Adriaan Boerenbeker, dalam agama Hindu, kedudukan wanita sama dengan pria. Hal ini dapat dilihat dalam pengukuhan imam Hindu atau padanda. Seorang imam Hindu atau padanda mendapatkan martabat itu setelah selesai masa belajarnya pada padanda lain, yang menjadi *nabe* baginya. *Nabe* inilah yang menuntun calon imam untuk mendalami isi buku-buku suci. Setelah masa belajar ini, dilangsungkan pentahbisan sebagai imam disertai upacara-upacara sebagaimana mestinya. Menurut paswara raja Lombok martabat keimanan tersebut terbuka bagi semua anggota - baik pria maupun wanita - dari ketiga kasta, yang disebut " triwangsa " .⁶⁵ Mereka dapat memperoleh martabat keimanan itu, termasuk wewenang penuh untuk memberikan kebutuhan-kebutuhan rohani,

⁶⁵ Maria Ulfah Subadio, SH, Dr.T.O.Ihromi, SH, *op.cit*, hlm. 267

baik kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain, dan untuk mengurus keselamatan jiwa orang yang meninggal. Jadi terbukti bahwa wanita tidak ditolak untuk memperoleh martabat padanda. Pada tahun 1911 jumlah imam (padanda) wanita lebih besar dari jumlah imam pria.

Menurut *Wacana Teologi Feminis Buddhis* yang dikemukakan oleh *Chatsumarn Kabilsingh*⁶⁶, disebutkan bahwa Buddhisme bukan saja bebas dari perbedaan kasta tetapi juga bebas dari perbedaan gender. Sang Buddha mulanya ragu untuk menerima Ratu Maha Pajapati – yang adalah bibinya sekaligus juga ibu tirinya– untuk menjadi anggota ordonya, namun kemudian ia setuju menerima Sang Ratu dengan dasar bahwa perempuan memiliki potensi yang setara dengan laki-laki untuk mencapai pencerahan atau penyelamat spiritual.

Dalam Brahmanisme, perempuan hanya diizinkan melakukan ibadah dalam status ‘ belahan dari sang suami’ . Mereka tidak boleh mempelajari naskah-naskah suci, satu-satunya jalan keselamatan mereka hanyalah lewat kesetiaan dan pelayanan terhadap suami mereka. Nilai sosial semacam itu memaksa perempuan untuk kawin, dan begitu mereka kawin lalu mereka harus mampu melahirkan anak laki-laki (atau *anak-anak* laki-laki). Adalah anak lelaki yang akan melakukan upacara-upacara keagamaan terakhir bagi orang tuanya, agar jiwa mereka masuk ke sorga. Jadi, perempuan dibebani dengan perkawinan dan status keibuan.

Dalam Buddhisme lain, Sang Buddha mengangkat semua beban itu dari pundak perempuan. Perempuan bisa tercerahkan melalui usaha-usahanya sendiri. Perempuan yang masih lajang ataupun yang berstatus janda diperlakukan setara. Hasilnya, banyak perempuan melepaskan diri

⁶⁶ Zakiyuddin Baidhawiy, (ed), *op cit*, hlm. 19 - 23

dari beban rumah tangga untuk bergabung dengan ordo Buddhisme sebagai biarawati-biaarawati (biksuni) yang ditahbiskan sepenuhnya. Para biarawan (biksu) dan para biarawati di masa awal Buddhisme juga mendapat perlakuan setara dari Sang Buddha.

Mula-mula mereka berbagi serangkaian aturan kebiaraan yang sama, namun seiring dengan berjalannya waktu banyak peraturan yang berkembang selagi komunitas biara makin besar. Beberapa aturan ditambahkan khusus bagi biarawan, dan aturan-aturan tambahan lainnya berlaku khusus bagi biarawati. Lainnya berlaku bagi keduanya. Yang menarik, ada peraturan-peraturan tertentu yang harus ditaati oleh biarawan agar mereka jangan sampai mengeksploitasi para biarawati. Kajian tentang perkembangan aturan kebiaraan secara jelas menunjukkan bahwa Sang Buddha mengambil peran sebagai seorang bapak untuk memastikan agar para biarawati, yakni anak-anak perempuannya yang lebih muda, jangan sampai dimanfaatkan oleh para saudara lelaki mereka yang lebih tua, yakni para biarawan.

Kajian yang menarik telah dilakukan oleh para sarjana feminis tentang Tripitaka (teks-teks kanonik Buddhis) untuk menyelidiki dan menyaring roh atau intisari Buddhisme yang pada umumnya membebaskan perempuan dari nilai-nilai sosial negatif yang terutama diambil dari Brahmanisme.

Siapapun yang membaca Tripitaka tanpa kewaspadaan semacam itu bisa dengan mudah tergelincir ke dalam jebakan untuk berpikir bahwa Buddhisme memiliki bias anti-perempuan, bahwa Buddhisme adalah patriarkhi dan bertanggung jawab atas banyak penyakit sosial dimana perempuan menjadi korbannya.

Secara tradisional, perempuan-perempuan Buddhis di Asia bersifat konservatif dan patuh atau tunduk (submisif). Ini bisa dimengerti, karena di berbagai negara Buddhisme telah menjadi wilayah eksklusif para biarawan (laki-laki). Perempuan hanya berperan serta di tingkat mempersembahkan doa dan menyokong kuil-kuil dan memberi sumbangan pada para biarawan.

Dengan diperkenalkannya feminisme, para perempuan Buddhis belajar untuk menemukan kekuatan untuk kembali ke naskah-naskah suci sebagai sumber otoritas. Mereka menemukan kekuatan dalam menempatkan *Dharma* (ajaran Sang Buddha) ke dalam praktik, sehingga secara spiritual mereka menemukan keseimbangan. Dengan kekuatan baru ini perempuan-perempuan Buddhis dapat bergerak ke masa depan sebagai mitra penuh, bertanggung jawab setara bagi perkembangan atau keruntuhan Buddhisme. Tanggung jawab ini telah diberikan kepada mereka oleh Sang Buddha sendiri.⁶⁷

Bagi tokoh-tokoh agama, adanya keadilan gender adalah sesuatu yang harus dilakukan. Karena pada saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk membatasi gerak perempuan dalam berbagai bidang. Hal tersebut dapat dilihat dari pendapat yang dikemukakan oleh beberapa tokoh agama berikut. Menurut Pandhite Gede Anom, tokoh agama Hindu :

“ Kesempatan harus diberikan (kepada wanita), walaupun masih diganjal oleh laki-laki. Walaupun laki-laki tetapi tidak mampu, apakah layak menjadi menteri, intelektual? Beberapa wanita pernah menjadi raja. Siapa yang mampu boleh menjadi pemimpin ... Tuhan tidak sediskriminatif itu. Manusia sebagai penerjemah kitab suci mungkin menjadi permasalahan, karena munculnya ego laki-laki. Manusalah yang membuat diskriminasi.”⁶⁸

Hal ini didukung oleh tokoh agama Budha, Bikhu Yana Kirti :

⁶⁷ *Ibid.*, hlm.22-23

⁶⁸ Retno Wulandari, *op.cit*, hlm. 69.

“ Sangat setuju perbedaan antara wanita dan laki-laki pada jaman Budha dihapuskan. Pada saat itu ibu sang Budha ingin mencapai Bhiksumi, Budha melarang itu, karena tidak dapat mencapai arahat. Ada salah satu murid mengatakan “ *mereka pun ingin mencapai tingkat kesucian rendah*”, sehingga tidak ada penghapusan kasta-kasta, reformasi sudah dilaksanakan. Jika ada perempuan menonjol itu bagus, negara dipimpin laki-laki pun selama ini tidak menjadi berhasil. Tapi kita juga tidak bisa melawan kodrat, kita harus mengetahui diri kita masing-masing. Kita laki-laki dan perempuan yang memiliki tugas dan kewajiban yang penting dalam keluarga, tugas ibu atau bapak itu bagaimana? Perempuan bersifat intelektual, bagi saya sepertinya dia harus sama dengan laki-laki” ⁶⁹

Pendapat lain dikemukakan oleh M. Najib dalam mendukung adanya keadilan gender berdasarkan ajaran Islam :

“ Terkait dengan jenis kelamin, di lapangan tapi lebih difokuskan pada bagaimana Islam menempatkan wanita. Di dalam teks-teks Al Qur’ an dan Hadits, ia akan memperoleh sesuatu sesuai dengan amal perbuatannya. Hal ini mencerminkan tidak ada diskriminasi yang tampak. Dalam pelaksanaannya, wanita terpinggirkan bagi kita semua. Terkait dengan budaya bangsa yang menempatkannya di berbagai bidang, menempatkan wanita tidak terlalu penting, wanita di belakang, wanita harus mendobrak itu, memberikan peluang yang sama, pendidikan dan informasi.” ⁷⁰

Menurut Maksun Faiz, dalam Islam, sejak abad VII M melalui Nabi Muhammad telah menyodorkan perbaikan hak perempuan, misalnya dalam hal warisan, menyejajarkan perempuan dan pria dalam hukum, kebebasan finansial dan sebagainya. Secara kodrati, memang keduanya ada perbedaan fisik, psikis dan hormonal. Namun, bukan berarti yang satu mengungguli yang lain, melainkan lebih mengacu kepada saling tergantung, saling membutuhkan dan saling menolong. Secara obyektif, memang harus diakui umat Islam di belahan dunia manapun kini mengalami kegagalan untuk menyamakan langkah dengan dunia masa kini. Hal itu karena kegagalan umat Islam untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan dalam

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 68

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 64



memahami Islam dengan latar belakang kondisi kehidupan yang berubah. Pada tahap awal peradaban Islam, mampu menyaring dan menyeleksi mana yang layak diterima dan dipadukan dengan yang sesuai, dan menolak yang tak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal itu cukup menguntungkan sekaligus membuktikan bahwa Islam itu dinamis, up to date dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun pada perkembangan berikutnya yaitu ketika pertentangan internal, perebutan kekuasaan, kekakuan ritual dan kekurangan kreativitas serta imajinasi dalam perkembangan kultural di bidang keilmuan dan teknologi, membawa seluruh peradaban muslim yang telah meluas pengaruhnya, menjadi stagnan dan meluncur jatuh. Maka, jika peradaban muslim ingin maju, harus berani mengadakan perubahan ataupun melalui proses perpaduan dan pembenahan. Dasar kehidupan spiritual Islam bersifat kekal, namun tetap membuka diri terhadap keragaman perubahan.⁷¹

Dalam Islam, kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sama, yang membedakan hanyalah ketaqwaan. Namun mayoritas umat Islam memiliki cara pandang yang negatif yaitu perempuan di belakang laki-laki, yang didasarkan pada teologi penciptaan (perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki).

Umat Islam masih sering terbius dalam konsep-konsep yang tak Islami dengan kedok Islami, sehingga terkadang agama dijadikan alat untuk menindas, bukan untuk membebaskan dari penindasan. Hal itu jelas bertentangan dengan Al Quran yang mengajarkan bahwa perempuan dan pria itu sejajar. (surat Ali Imron ayat 195).⁷² Posisi sejajar yang dimaksudkan oleh ayat itu adalah dalam kesederajatan, bukan keseragaman. Sebab bagaimanapun secara kodrati antara keduanya memiliki perbedaan fisik, psikis dan hormonal. Namun bukan berarti yang satu mengungguli

⁷¹ Surabaya Post, 19 April 2002

yang lain, melainkan lebih mengacu kepada saling tergantung, saling membutuhkan dan saling menolong.

Menurut Pendeta Simon, seringkali manusialah yang menyebabkan adanya perbedaan yang cenderung merendahkan wanita. Hal itu seperti diungkapkannya :

“ ...cerita Adam dan Hawa, yang menganggap laki-laki dan perempuan kita sendiri... selalu memandang rendah fakta perempuan adalah hasil karya laki-laki, dimana perempuan berasal dari tulang rusuk laki-laki sebelah kiri. Secara nalar tidak masuk akal, sebab apakah betul hanya dengan mencabut rusuk, jadi perempuan? Agama tidak boleh dicampur dengan masalah politik.. agama jangan dijadikan kendaraan dalam berpolitik, seolah-olah agama tidak dapat menjelaskan persoalan masyarakat ...”⁷³

Selanjutnya ia memberikan pendapat yang mengarah pada penguatan peran wanita :

“ Selama bisa menjaga keutuhan keluarga, tidak menjadi masalah karena dalam kehidupan ada dua jalan. Seseorang yang berjalan mengikuti ritual keagamaan seperti para romo, pendeta, sehingga tidak memihak. Ada yang memilih jalan kehidupan rumah tangga, ada yang berperan ganda, asal tidak membawa kerugian atau keributan tidak masalah.”⁷⁴

Hal yang hampir sama disampaikan oleh Romo Hadinata :

“ Dalam pelaksanaan berbeda daripada prinsipnya, tapi pada hakikatnya akhir-akhir ini tidak ada lagi diskriminasi apalagi pelecehan. Pada agama masih didominasi laki-laki, tapi tidak mengurangi penghormatan terhadap gender, perempuan, ibu Maria sangat dihormati dengan gambar, patung, doa-doa. Hal itu digambarkan bahwa agama lain juga menghormatinya seperti dalam Al Quran...”

⁷² *Ibid*

⁷³ Retno Wulandari, *op.cit*, hlm. 70

⁷⁴ *Ibid*

Romo Hadinata menegaskan kembali tentang tidak adanya perbedaan laki-laki dan perempuan dalam segala bidang baik itu domestik maupun publik, seperti tampak dalam kutipan berikut :

“ Titik tolak pandangan Katolik, pada kitab Kejadian Bab 1 ayat 36 dan 37 diketahui secara psikologis pragmatis, “ Allah menciptakan pada hari ketujuh manusia; laki-laki dan perempuan” . Dengan demikian sudah ditunjukkan pandangan Alkitab yang dipakai Kristen, laki-laki dan perempuan, sama, manusia.” ⁷⁵

Kesalahan teologis itu ternyata mempengaruhi budaya masyarakat, sehingga mengakibatkan profesi yang dihargai masyarakat harus diberikan kepada laki-laki, sedangkan sisanya baru diberikan perempuan. Stereotype yang memagari profesi perempuan seperti ini masih banyak terjadi di negara maju, apalagi negara berkembang. Jelas ini tak sesuai dengan ajaran agama karena pada dasarnya semua agama menghargai hasil kerja perempuan dan mendorong perempuan untuk bekerja serta berprofesi mulia. Di bidang pendidikan pun tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, semuanya wajib untuk menuntut ilmu. Perempuan yang ditakdirkan oleh Allah sebagai ibu, secara langsung dia membimbing, mendidik serta mewariskan berbagai kemampuannya. Secara luas, bisa diartikan sebagai pemegang peranan penting dalam pendidikan moral masyarakat.

Pandangan para tokoh agama mengenai pembagian kerja, diskriminasi dan kesetaraan gender dapat dilihat pada tabel di bawah :

⁷⁵ *Ibid*

Tabel 2
Pandangan Tokoh Agama Mengenai Gender

Tokoh	Sudut pandang	Pendapat
I. PEMB. KERJA		
1. Maksun Faiz	Islam	dalam Islam, peran politik, sampai saat ini masih menjadi polemik di kalangan ulama. bahkan di kalangan para politisi muslim. terutama menyangkut legalitas perempuan untuk menjadi kepala negara.
2. N. Graafland	Kristen	dalam masyarakat Minahasa, dimana sebagian besar penduduknya adalah jemaat Kristen. pada jaman animisme perempuan tidaklah rendah martabatnya. Di daerah utara jabatan imam boleh diduduki oleh kaum pria. tetapi di daerah selatan umumnya wanitalah yang memangku jabatan itu.
3. Pandhite Gede Anom	Hindu	Tidak terkotak-kotak wilayah kerja laki-laki dan perempuan, dalam ajaran Agama Hindu dikatakan, " laksanakan kewajibanmu tanpa menghitung untung rugi karena aku melebur dalam segala ciptaanku" . oleh karena itu tidak ada gender dalam masyarakat Hindu. Sehingga dalam keseharian sebagaimana manusia secara utuh tidak berbeda antara laki-laki dan perempuan baik karirnya di bidang publik maupun rumah tangga
4. Bikhu Yana Kirti	Budha	selain mereka mampu melakukan tugas dan kewajiban sebagai dharma, moralitas dan kebajikan, tidak ada pembagian kerja dimana laki-laki di luar dan perempuan di rumah. Nilai spiritual seseorang mencapai <i>arahat</i> harus dalam wujud laki-laki. Dalam agama Budha dikenal reinkarnasi
II. DISKRIMINASI		
1. Bakharudin Ahmad	Islam	Perempuan (dicontohkan melalui masyarakat Sumatra Barat setelah kembali dalam otonomi daerah), masih menduduki posisi warga negara kelas dua dalam politik lokal
2. Ny. Hj. Zainab Zaki	Islam	Dalam ekonomi wanita menjadi warga kelas dua, hal ini dicontohkan pada kondisi masyarakat pedesaan
3. Egbert Adriaan Boerenbeker	Hindu	dalam agama Hindu, walaupun para wanita mempunyai hak yang sama menjadi imam (padanda), tetapi mereka masih mendapatkan ketidakadilan dalam mendapatkan posisi tersebut. Dimana mereka seringkali mendapat paksaan utamanya dari suami mereka untuk menerima posisi menjadi padanda.
4. Bikhu Yana Kirti	Budha	Tidak setuju (adanya diskriminasi), seseorang



		terlahir sebagai manusia tergantung dari karma atau perbuatan masing-masing. Seseorang terlahir sebagai wanita terjadi pembagian peran, berarti ada pemikiran yang salah. Siapapun boleh melakukan (memimpin) apapun, sama kedudukan laki-laki dan perempuan
5. Hafidz	Islam	kadang tampak beberapa kontradiksi dalam Islam (atau dalam penginterpretasiannya). Di satu pihak disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan berasal " dari satu zat " dan bahwa laki dan perempuan berada dalam kedudukan yang sama, tapi di lain pihak kaum laki-laki boleh menindak istrinya apabila menunjukkan pembangkangan (Surat 4 ayat 34); atau bahwa kaum perempuan harus tetap di rumah agar tidak kembali ke jaman jahilliyah sebelumnya (Surat 33 ayat 33); atau bahwa pembagian warisan kepada anak lelaki sama dengan dua anak perempuan (Surat 4 ayat 11).
6. Manu	Hindu	sejak ayunan hingga liang lahat seorang perempuan tergantung pada laki-laki; di masa kanak-kanak tergantung pada ayahnya; di masa muda kepada suaminya; di masa tua kepada anak laki-lakinya" , tidak begitu jauh dengan kenyataan jutaan perempuan Hindu
7. Pandhite Gde Anom	Hindu	Hindu tidak ada masalah, beberapa kali raja-raja di Indonesia itu perempuan semua, antara gender terdapat perbedaan perlakuan terhadap perempuan karena adanya perbedaan pandangan terhadap gender. Di Hindu, boleh, tidak ada perbedaan. Memang kadang karena budaya, agama, sehingga sudut pandang terpolarisasi seperti itu, namun seringkali mungkin tidak ada agama yang diskriminatif. Wanita dalam rumah tangga menjadi kepala rumah tangga dan lebih luas lagi menjadi tiang pancang negara
8. KH Hasyim Abas	Islam	Kedudukan (wanita) sama dalam hal-hal yang umum, namun dalam beberapa hal ia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda
9. Ratna Saptari	Islam	poligami dalam Islam mengasumsikan bahwa laki-laki mempunyai dorongan seksual yang besar yang harus disalurkan sehingga laki-laki diperbolehkan kawin dengan paling banyak empat perempuan, tetapi juga dianjurkan menjaga keseimbangan di antara mereka agar tak timbul konflik-konflik sosial. Seorang perempuan hanya boleh kawin dengan satu-satu laki-laki, dan kadang harus membaginya dengan perempuan lainnya yang juga menjadi istri suaminya
10. Pendeta Lies Sigilipu Saino	Kristen	Posisi perempuan yang lemah secara adat dan

		agama makin menyudutkan perempuan utamanya di daerah konflik. Sehingga perlu diadakannya rekonstruksi tradisi dan adat, juga reinterpretasi dan dekonstruksi pemahaman keagamaan, agar konflik bisa diselesaikan dan penghargaan terhadap hak-hak perempuan dikembangkan
III. KEADILAN DAN KESETARAN GENDER		
1. Egbert Adriaan Boerenbeker	Hindu	dalam agama Hindu, kedudukan wanita sama dengan pria. Hal ini dapat dilihat dalam pengukuhan imam Hindu atau padanda. Seorang imam Hindu atau padanda mendapatkan martabat itu setelah selesai masa belajarnya pada padanda lain, yang menjadi <i>nabe</i> baginya. <i>Nabe</i> inilah yang menuntun calon imam untuk mendalami isi buku-buku suci. Setelah masa belajar ini, dilangsungkan pentahbisan sebagai imam disertai upacara-upacara sebagaimana mestinya. Menurut paswara raja Lombok martabat keimanan tersebut terbuka bagi semua anggota - baik pria maupun wanita - dari ketiga kasta, yang disebut " triwangsa"
2. Pandite Gde Anom	Hindu	Kesempatan harus diberikan (kepada wanita), walaupun masih diganjal oleh laki-laki. Tuhan tidak sediskriminatif itu. Manusia sebagai penerjemah kitab suci mungkin menjadi permasalahan, karena munculnya ego laki-laki. Manusalah yang membuat diskriminasi
3. Bikhu Yana Kirti	Budha	Sangat setuju perbedaan antara wanita dan laki-laki pada jaman Budha dihapuskan. Pada saat itu ibu sang Budha ingin mencapai Bhiksumi, Budha melarang itu, karena tidak dapat mencapai arahat. Jika ada perempuan menonjol itu bagus, negara dipimpin laki-laki pun selama ini tidak menjadi berhasil. Tapi kita juga tidak bisa melawan kodrat, kita harus mengetahui diri kita masing-masing. Kita laki-laki dan perempuan yang memiliki tugas dan kewajiban yang penting dalam keluarga, tugas ibu atau bapak itu bagaimana? Perempuan bersifat intelektual, bagi saya sepertinya dia harus sama dengan laki-laki
4.M. Najib	Islam	Terkait dengan jenis kelamin, di lapangan tapi lebih difokuskan pada bagaimana Islam menempatkan wanita. Di dalam teks-teks Al Qur' an dan Hadits, ia akan memperoleh sesuatu sesuai dengan amal perbuatannya. Hal ini mencerminkan tidak ada diskriminasi yang tampak. Dalam pelaksanaannya, wanita terpinggirkan bagi kita semua. Terkait dengan budaya bangsa yang menempatkannya di



		berbagai bidang, menempatkan, wanita tidak terlalu penting, wanita di belakang
5. Maksun Faiz	Islam	Mayoritas perempuan terkungkung dalam empat dinding rumahnya. Sehingga kaum perempuan perlu dimerdekakan dari kungkungan tradisinya yang membodohkan. Kebodohan hanya akan melahirkan perbudakan, adapun ilmu akan melahirkan kemerdekaan (<i>hurriyah</i>).
6. Ghazala Anwar	Islam	ia memandang feminisme sebagai sebuah gerakan di dalam gerakan umum untuk memulihkan martabat, kebebasan, dan kesetaraan bukan saja diantara manusia melainkan juga diantara semua makhluk yang mendiami bumi ini. Tidak ada konflik antara pemahaman yang dimilikinya tentang Islam, sebagai perdamaian, sebagai ketiadaan kekurangan, dengan pemahamannya tentang feminisme
7. Pendeta Simon	Kristen	cerita Adam dan Hawa, yang menganggap laki-laki dan perempuan kita sendiri... selalu memandang rendah fakta perempuan adalah hasil karya laki-laki, dimana perempuan berasal dari tulang rusuk laki-laki sebelah kiri. Secara nalar tidak masuk akal, sebab apakah betul hanya dengan mencabut rusuk, jadi perempuan? Agama tidak boleh dicampur dengan masalah politik.. agama jangan dijadikan kendaraan dalam berpolitik, seolah-olah agama tidak dapat menjelaskan persoalan masyarakat Selama bisa menjaga keutuhan keluarga, tidak menjadi masalah karena dalam kehidupan ada dua jalan. Seseorang yang berjalan mengikuti ritual keagamaan seperti para romo, pendeta, sehingga tidak memihak. Ada yang memilih jalan kehidupan rumah tangga, ada yang berperan ganda, asal tidak membawa kerugian atau keributan tidak masalah.
8. Aruna Granadason	Kristen	memusatkan perhatian pada pemberdayaan perempuan, hingga perempuan dapat menjadi penentu agenda kepedulian yang akan dilaksanakan oleh gereja. Keputusan tentang struktur-struktur mana saja yang perlu digugat dalam gereja mereka, negara mereka, dalam wilayah serta dunia mereka, tergantung pada perempuan sendiri. Meski demikian, ini adalah sebuah Dekade Gereja-gereja, bukan Dekade Perempuan, sehingga jelaslah bahwa perubahan-perubahan struktural hanya bisa terjadi pada saat seluruh masyarakat lelaki dan perempuan didalam gereja bersedia untuk bertindak penuh solidaritas dengan perempuan



<p>9. Romo Hadinata</p>	<p>Katolik</p>	<p>Titik tolak pandangan Katolik, pada kitab Kejadian Bab 1 ayat 36 dan 37 diketahui secara psikologis pragmatis, " Allah menciptakan pada hari ketujuh manusia; laki-laki dan perempuan". Dengan demikian sudah ditunjukkan pandangan Alkitab yang dipakai Kristen, laki-laki dan perempuan, sama, manusia</p>
-------------------------	----------------	---

Sumber : Data yang terkumpul

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

IV.1. KESIMPULAN

Keinginan untuk memahami gender secara lebih mendalam, akhir-akhir ini semakin disadari, bukan saja karena adanya tekanan dari wanita. Sebagian dari pendorong itu adalah gerakan peningkatan kedudukan wanita dalam berbagai konteks kehidupan, yang sekarang telah menjadi gejala universal dan yang meliputi seluruh dunia. Di Indonesia hampir semua uraian tentang program pengembangan masyarakat maupun pembangunan di kalangan organisasi non pemerintah diperbincangkan masalah gender.

Dalam pembahasan teoritis maka suatu pokok yang dianggap sangat mendasar adalah : bagaimana keterangan yang harus diberikan pada adanya perbedaan di antara wanita dan pria. Di kalangan tokoh-tokoh keagamaan terdapat pandangan yang berbeda dalam melihat masalah gender. Seringkali dalam pemeluk agama yang sama, juga terdapat pandangan yang berbeda. Tetapi jika diteliti secara mendalam, walaupun sudut pandang mereka berbeda, tetapi pada dasarnya mereka menginginkan adanya keadilan gender dan menolak adanya diskriminasi terhadap perempuan.

Dalam masalah pembagian kerja, perempuan tidak dibedakan dalam wilayah kerjanya dengan laki-laki. Selama perempuan mampu, maka ia bisa menduduki posisi apapun dalam masyarakat. Hanya saja masih banyak terdapat kontroversi berkaitan dengan legalitas perempuan untuk menjadi

pemimpin negara. Umumnya mereka menggunakan kaidah-kaidah agama untuk menghambat kemajuan keterlibatan perempuan dalam beraktivitas. Di samping itu, dalam rumah tangga, peranan perempuan tetap dianggap di bawah pria, walaupun tidak semata-mata secara langsung dikatakan demikian. Tetapi pada dasarnya wanita adalah ibu rumah tangga, dimana kewajiban itu tidak bisa disangkal lagi. Ia adalah ibu yang harus mengasuh anak-anak dan melayani suami. Perempuan yang tidak menjalankan peranan tersebut dalam masyarakat dianggap *tabu*. Sedangkan pria, tetap dianggap sebagai kepala rumah tangga, dimana posisi itu baru bisa digantikan oleh istri, jika suami telah meninggal/tidak ada.

Dalam sebagian besar agama, telah mengembangkan gerakan liberal, tapi di sisi lain terdapat tarikan yang kuat ke arah fundamentalisme. Fundamentalisme cenderung menekankan perbedaan perempuan (diskriminasi). Poligami dalam Islam mengasumsikan bahwa laki-laki mempunyai dorongan seksual yang besar yang harus disalurkan sehingga laki-laki diperbolehkan kawin dengan paling banyak empat perempuan, tetapi juga dianjurkan menjaga keseimbangan di antara mereka agar tak timbul konflik-konflik sosial. Seorang perempuan hanya boleh kawin dengan satu laki-laki, dan kadang harus membaginya dengan perempuan lain yang juga menjadi istri lainnya. Disinilah mungkin perlu dipertanyakan kembali tradisi Islam yang menempatkan perempuan pada kenyataan-kenyataan social, ekonomi, hukum, yang menempatkan pada posisi konservatif. Wacana di atas setidaknya menyediakan tempat bagi feminis muslim untuk merenungkan kembali adanya persilangan antara agama Islam dengan kehidupan perempuan.

Demikian juga walaupun ada bukti dalam sepanjang sejarah Kristen, dimana perempuan memainkan peran kepemimpinan dalam komunitasnya, tradisi Kristen menentang gagasan tersebut. Perdebatan tentang pendeta perempuan menghasilkan pelbagai macam alasan mengapa perempuan seharusnya tidak ditasbihkan. Banyak alasan yang menunjuk kepada perbedaan biologis dasar perempuan, dan peran melahirkannya, maupun kepada sejarah dan tradisi. Dalam agama Hindu, walaupun para wanita mempunyai hak yang sama menjadi imam (padanda), tetapi mereka masih mendapatkan ketidakadilan dalam mendapatkan posisi tersebut. Dimana mereka seringkali mendapat paksaan utamanya dari suami mereka untuk menerima posisi menjadi padanda.

Sama halnya yang terjadi pada teologi Budhhis dimana perempuan sebenarnya tetap menemukan kekuatan dalam menempatkan Dharma ke dalam praktek, sehingga secara spiritual perempuan dapat menemukan suatu keseimbangan. Dengan kekuatan-kekuatan baru ini perempuan akan menuju pada pendulum keseimbangan dengan pria sebagaimana yang diajarkan oleh Budha Gautama.

Walaupun dalam pandangan (yang dianggap menurut agama) berlaku demikian, para tokoh agama mempunyai keinginan penghapusan diskriminasi dan dapat diwujudkan adanya keadilan gender. Mereka beranggapan bahwa gender adalah pembagian jenis kelamin dan tidak membedakan peranan mereka dalam masyarakat. Perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam berbagai bidang. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga adalah hubungan kerja sama dalam kehidupan rumah tangga dan tidak berhubungan dengan kekuasaan yang tercermin dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan keluarga. Sedangkan diskriminasi yang terjadi dalam dunia publik adalah suatu bentuk



yang sebenarnya tidak terjadi. Semua muncul karena adanya budaya dan penafsiran yang salah tentang peranan wanita.

Memang masih banyak batu sandungan bagi perempuan, terutama terkait dengan interpretasi ajaran agama, yang menjadikan posisi ketidakseimbangan antara perempuan dan pria di dalam struktur masyarakat. Kesalahan teologis itu ternyata mempengaruhi budaya masyarakat, sehingga mengakibatkan profesi yang dihargai masyarakat harus diberikan kepada laki-laki, sedangkan sisanya baru diberikan perempuan. Stereotype yang memagari profesi perempuan seperti ini masih banyak terjadi di negara maju, apalagi negara berkembang. Jelas ini tak sesuai dengan ajaran agama karena pada dasarnya semua agama menghargai hasil kerja perempuan dan mendorong perempuan untuk bekerja serta berprofesi mulia.

IV.2. SARAN

Untuk memperkaya pembahasan dan penggalian data dan fenomena dalam masyarakat, dibutuhkan penjelasan mendalam dan peningkatan pembahasan mengenai masalah gender. Sebab walaupun masalah gender marak menjadi perbincangan sebenarnya masih terdapat ketidakjelasan dan kesalahpahaman mengenai apa yang dimaksud dengan konsep gender. Dengan semakin dipahaminya masalah gender maka diharapkan peran perempuan juga semakin diperhitungkan. Untuk itu penelitian mengenai masalah gender dengan berbagai sudut pandang masih sangat diperlukan.



Daftar Pustaka

- Baidhawiy, Zakiyuddin, ed, *Wacana Teologi Feminis*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997
- Brown, Gillian, George Yule, *Analisis Wacana Discourse Analysis*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Cleves mosse, Julia, *Gender dan Pembangunan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996
- Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisa Teks Media*, Yogyakarta, LkiS, 2001
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Jakarta, Pustaka Pelajar, 1996
- Fakih, Mansour, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda?*, Jakarta, Mizan, 1999.
- Sadli, Saparinah, Prof. Dr, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial, sebuah Pengantar Studi Perempuan*, Jakarta, Pustaka Utama Grafitti, 1997
- Suyanto, Bagong, ed, *Wanita dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan*, Surabaya, Airlangga University Press, 1996.
- Turner, Bryan, *Teori-teori Sosiologi Modernitas Posmodernitas*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000
- Ulfah Subadio, Maria, SH, Prof. Dr. T.O. Ihromi, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1986
- Umar, Nazarudin, *Argumen Kesetaraan Gender*, Jakarta, Paramadina, 1999
- W. Cantor, Dorothy, Toni Bernay, *Women in Power, Kiprah Wanita dalam Dunia Politik*, Jakarta, PT Gramedia, 1998.

Kompas
Surabaya Post

-1 DEC 2003



1988
1988
1988
1988

MAJLIS

SEMAI

